



**LAPORAN
KINERJA
TAHUN 2025**

**LOKA LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT KUPANG**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan. Sebagai salah satu instansi Pemerintah, Loka Labkesmas Kupang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait administrasi laboratorium kesehatan masyarakat.

Kewajiban tersebut dituangkan melalui LAKIP serta capaian-capaiannya pada Tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai perangkat untuk melaporkan capaian realisasi kinerja serta menilai keberhasilan organisasi pada Tahun 2025. Diharapkan pelaksanaan kinerja Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025 tersebut menjadi lebih terarah dan fokus pada output kegiatan.

LAKIP Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja. Semoga laporan ini dapat menjadi masukan bagi penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pegawai Loka Labkesmas Kupang yang telah banyak membantu hingga terselesainya penyusunan LAKIP Tahun 2025 ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2025. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati karya dan pengabdian kita.

Kupang, Januari 2025

Kepala Loka Labkesmas Kupang



Majematang Mading, SKM.M.Ked.Trop

NIP. 197706152006042002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen pertanggungjawaban tertulis sebagai bentuk laporan yang akuntabel dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan penggunaan anggaran yang menitikberatkan pada pengukuran kinerja. Pada Tahun 2025 Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai wujud komitmen pelaksanaan program dan kegiatan melalui indikator kinerja dan dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi.

Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kupang mengemban tugas dalam melaksanakan pengelolaan Labkesmas sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tahun 2025 Loka Labkesmas Kupang diharapkan dapat mendukung capaian indikator kinerja program yang terukur, rasional, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan program. Capaian indikator yang telah disusun berdasarkan dokumen perjanjian kinerja sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Capaian	%
Kegiatan: Peningkatan Fasilitas, Mutu dan Tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat				
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Labkesmas	Jumlah Pemeriksaan Spesimen Klinis dan/atau Sampel	10.000 Spesimen Klinis/atau sampel	25.090 Spesimen Klinis/atau sampel	250
	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	5 Rekomendasi	12 Rekomendasi	240
	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100 %	100 %	100
	Jumlah MoU/PKS/Forum koordinasi dengan jejaring lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	5 MoU/PKS/Laporan	12 MoU/PKS/Laporan	240
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Mutu Labkesmas	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 Kali	3 Kali	150
	Labkesmas memiliki standart minimal sistem pengelolaan biorepositori	100 %	100	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
		Target	Capaian	%
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan di Labkesmas				
Meningkatnya kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas	77 (Nilai)	87,5	113,6
	Nilai Kinerja Anggaran Labkesmas	92,35 (Nilai)	96,74	104,7
	Indeks Kualitas SDM Labkesmas	81 (Nilai)	81,17	100
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)	3,95 (Nilai)	3,60	91,13
	Presentasi realisasi anggaran Labkesmas	96 %	86,88%	90,5
	Kinerja Implementasi WBK Satker	75 Skala	39,81	53,08
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	97,5	121,8
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas	95%	88,65%	93,31

Berdasarkan hasil penilaian kinerja Tahun 2025, pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fasilitas, Mutu, dan Tata Kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat baik, dengan seluruh indikator kinerja mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen di Labkesmas Tahun 2025 telah berjalan dengan cukup efektif, ditandai dengan mayoritas indikator kinerja yang mencapai dan melampaui target. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan peningkatan dan tindak lanjut berkelanjutan guna mendorong perbaikan kinerja organisasi secara menyeluruh di masa mendatang. Selanjutnya LAKIP ini disusun untuk memberikan laporan tertulis atas kinerja yang telah dicapai Loka Labkesmas Kupang dalam kurun waktu satu Tahun dan diharapkan menjadi masukan untuk perbaikan kinerja pada Tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	4
C. Dasar Hukum	7
D. Permasalahan Utama	8
E. Struktur Organisasi	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA dan PERJANJIAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029	21
B. Target Kinerja	24
C. Sasaran Strategis.....	26
D. Perjanjian Kinerja Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025	27
E. Analisis SMART Loka Labkesmas) Kupang Tahun 2025	31
F. Indikator Perjanjian Kinerja UPT Labkesmas Tahun 2025	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. Capaian Kinerja Organisasi	41
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	83
C. Penghargaan.....	89
BAB IV PENUTUP	91
Lampiran	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Loka Labkesmas Kupang Berdasarkan Jenis kelamin.....	19
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Loka Labkesmas Kupang berdasarkan golongan.....	19
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Loka Labkesmas Kupang Berdasarkan Pendidikan.....	20
Tabel 1.4 Jumlah pegawai Loka Labkesmas Kupang berdasarkan jabatan fungsional . ____	20
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.....	23
Tabel 2.2 Target Kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Tahun 2025-2029	26
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025.....	27
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Revisi Renstra Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025	29
Tabel 2.5 Analisis SMART Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025.....	31
Tabel 2.6 Indikator Perjanjian Kinerja UPT Labkesmas Tahun 2025	34
Tabel 3.1 Capaian IKK Pada Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Labkesmas Tahun 2025	42
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Pemeriksaan Spesimen Klinis dan/atau Sampel.....	43
Tabel 3.3 Pemeriksaan Spesimen Klinis dan/atau Sampel Kegiatan Surveilans Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025	43
Tabel 3.4 Rekomendasi Kebijakan hasil Surveilans berbasis laboratorium Tahun 2025.....	48
Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Surveilans Berbasis Laboratorium	50
Tabel 3.6 Persentase capaian Bimbingan Teknis secara Rutin dan Berjenjang di Wilayah Binaan oleh UPT Labkesmas	51
Tabel 3.7 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Secara Rutin dan Berjenjang di Wilayah Binaan Loka Labkesmas Kupang.....	51
Tabel 3.8 Kegiatan jejaring dan kerja sama yang telah di laksanakan oleh Loka Labkesmas Kupang	55
Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Indikator Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan Jejaring, Lembaga/Institusi Nasional	57
Tabel 3.10 Uraian target dan realisasi Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Mutu Labkesmas Tahun 2025.....	57
Tabel 3.11 Realisasi Kinerja Indikator Mengikuti dan Lulus Pemanapan Mutu Eksternal (PME)	59
Tabel 3.12 Capaian Pengelolaan sistem Biorepository di Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang Tahun 2025.....	63
Tabel 3.13 Sampel/Spesimen yang tersimpan di biorepository Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025.....	64
Tabel 3.14 Capaian IKK Pada Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan	65
Tabel 3.15 Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Loka Labkesmas Kupang.....	72
Tabel 3.16 Daftar Rekapitan Peningkatan Kapasitas SDM Tahun 2025	79
Tabel 3.17 Rincian Penyetoran Pengembalian Jaminan	83
Tabel 3.18 Perbandingan dengan UPT Loka Labkesmas	84
Tabel 3.19 Analisis Efisiensi Anggaran Berdasarkan Indikator Tahun 2025.....	88
Tabel 3.20 Matrix Jumlah Pegawai dan kebutuhan berdasarkan petan Jabatan Loka Labkesmas Tahun 2025	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka Labkesmas Kupang	19
Gambar 3.1 Bukti keikutsertaan dan lulus PME – Uji Profisiensi Identifikasi Nyamuk	60
Gambar 3.2 Hasil Evaluasi Identifikasi Nyamuk Pada PME-Uji Profisiensi Identifikasi Nyamuk.....	60
Gambar 3.3 Bukti Keikutsertaan dan lulus PME- Pemantapan Mutu Eksternal bidang Mikrobiologi siklus-1 Tahun 2025 (Parameter Mikroskopis Malaria)	61
Gambar 3.4 Bukti Keikutsertaan dan lulus PME- Pemantapan Mutu Eksternal bidang Mikrobiologi siklus-2 Tahun 2025 (Parameter Mikroskopis Malaria)	61
Gambar 3.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Loka Labkesmas Kupang Semester I Tahun 2025	67
Gambar 3.6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Loka Labkesmas Kupang Semester II Tahun 2025	67
Gambar 3.7 Nilai Kinerja Anggaran Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025	70
Gambar 3.8 Indeks Profesionalitas ASN Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025	71
Gambar 3.9 Banner terkait Wilayah Bebas Korupsi di Loka Labkesmas Kupang	77
Gambar 3.10 Hasil Penilaian WBK Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025	77
Gambar 3.11 Tanda Penghargaan UPT dengan kepatuhan interaksi pelayanan publik Kemenkes	90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah saat ini terus melakukan upaya pengembangan dan pembangunan sumber daya yang berkualitas serta membenahi tata kelola manajemen pemerintahan yang lebih baik dengan berbagai upaya, salah satunya melalui pembangunan integritas dan loyalitas sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, serta penyediaan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut diwujudkan melalui pelaporan yang terintegrasi, baik realisasi anggaran ataupun realisasi capaian output yang berkualitas dan akuntabel, salah satunya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Lakip adalah laporan kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi gambaran, perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Laporan Kinerja disusun dengan merujuk kepada beberapa peraturan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Periode Tahun 2025-2029 merupakan tahapan dari rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan RPJPN, di mana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

1. Terjaminnya ketahanan sistem kesehatan melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respons terhadap ancaman kesehatan global;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Life Expectancy (HALE)*.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025- 2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Selaras dengan visi pada RPJMN 2025-2029, Kementerian Kesehatan menetapkan visi 2025-2029, yaitu Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
2. Membudayakan gaya hidup sehat
3. Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau
4. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive
5. Memperkuat tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan

6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
7. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kupang sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Kesehatan Kesehatan Primer dan Komunitas mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. LAKIP merupakan media informasi yang digunakan oleh kementerian lembaga, pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan program kerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). LAKIP disusun sebagai wujud pertanggungjelas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta pengelolaan sumber daya maupun kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, yang disusun berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kesejahteraan masyarakat.

Loka Labkesmas Kupang secara aktif terus berupaya mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan program kerja di bidang kesehatan yang telah dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas sebagai unit eselon 1 dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sekaligus membantu terwujudnya program nasional pemerintah. Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi, Loka Labkesmas Kupang senantiasa terus meningkatkan kinerja yang berorientasi pada *output* dan *outcome*, serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Laporan Kinerja Pegawai Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025 menunjukkan pencapaian keberhasilan program pencegahan dan pengendalian penyakit di Indonesia, khususnya di wilayah layanan yang disusun secara sistematis, informatif, transparan dan akuntabel.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dan juga dalam rangka akuntabilitas, maka Loka Labkesmas Kupang dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja pada akhir Tahun pelaksanaan kinerja. LAKIP ini digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat pada Tahun berikutnya serta berfungsi untuk mengetahui kemampuannya Loka Labkesmas Kupang sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah pusat di bidang pembangunan kesehatan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Maksud dari disusunnya Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas adalah untuk menjabarkan lebih lanjut tugas dan fungsi organisasi, kewenangan, dan membentuk mekanisme kerja organisasi yang efektif dan efisien. Tujuan penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah:

1. Menjadi acuan bagi seluruh UPT dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
2. Memberikan batasan kewenangan dan peran masing-masing dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
3. Memberikan panduan kepada seluruh UPT dalam menyusun tim kerja
4. Klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai UPT Bidang Labkesmas terdiri atas:
 - a. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 - b. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 - c. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Tugas dan Fungsi :

1. Tugas UPT Bidang Labkesmas sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, yaitu: melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
2. UPT Bidang Labkesmas sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan
 - c. Pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium
 - d. Analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan
 - e. Pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna

- f. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya
 - g. Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan
 - h. Pengelolaan biorepositori
 - i. Pelaksanaan bimbingan teknis
 - j. Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium
 - k. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan
 - l. Pengelolaan data dan informasi
 - m. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
 - n. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Labkesmas
3. Fungsi UPT Bidang Labkesmas sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan terhadap spesimen klinis
 - b. Pengujian terhadap sampel vektor, reservoir, zoonosis, dan lingkungan
 - c. Konfirmasi hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan termasuk pada kejadian luar biasa, wabah dan bencana
 - d. Pengelolaan logistik laboratorium
 - e. Pengelolaan biosafety dan biosecurity
 - f. Pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan laboratorium
 - g. Pengelolaan dan analisis data surveilans kesehatan berbasis laboratorium
 - h. Investigasi kejadian luar biasa, wabah dan bencana berbasis laboratorium
 - i. Pengembangan metode pemeriksaan laboratorium
 - j. Pembuatan prototipe teknologi tepat guna
 - k. Pelaksanaan penjaminan mutu internal laboratorium
 - l. Pelaksanaan penjaminan mutu eksternal laboratorium
 - m. Penyelenggaraan penjaminan mutu eksternal laboratorium melalui uji profisiensi dan/atau uji kalibrasi
 - n. Pemantauan tindak lanjut hasil penjaminan mutu eksternal yang telah dipenuhi oleh laboratorium kesehatan
 - o. Pengelolaan biorepositori untuk spesimen klinis dan sampel penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat

- p. Pelaksanaan rujukan spesimen dan/ atau sampel laboratorium kesehatan termasuk transport spesimen
 - q. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium kesehatan; pembinaan teknis penyelenggaraan laboratorium kesehatan
 - r. Pengoordinasian jejaring laboratorium kesehatan
 - s. Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga/institusi nasional dan/atau internasional
 - t. Pengelolaan data dan informasi laboratorium termasuk analisa komputasional dan bioinformatik
 - u. Analisis dan penyusunan rekomendasi intervensi masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan berdasarkan pemeriksaan laboratorium
 - v. Diseminasi rekomendasi intervensi masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan pemangku kepentingan terkait lainnya
 - w. Pengawasan dan penyidikan bidang laboratorium kesehatan
4. Spesimen klinis sebagaimana dimaksud dalam angka 3 merupakan bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk *new-emerging* dan *re-emerging*, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.
5. Sampel sebagaimana dimaksud dalam angka 3 merupakan bahan yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit untuk tujuan pengujian dalam rangka penetapan penyakit dan faktor risiko lain berbasis laboratorium.
6. Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 2, UPT bidang Labkesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum juga menyelenggarakan fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Perencanaan pengadaan barang dan jasa
 - b. Pengadaan barang dan jasa
 - c. Pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa
 - d. Pengelolaan manajemen risiko pengadaan barang dan jasa
 - e. Penerimaan hasil pengadaan barang dan jasa
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa

7. Fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa diwadahi dalam Unit Layanan Pengadaan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, maka pada tanggal 16 Agustus 2023 Loka Litbangkes Kupang telah bertransformasi menjadi Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang. Dan pada tanggal 26 September 2025 menjadi Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang.

C. Dasar Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Loka Labkesmas Kupang disusun berdasarkan landasan hukum berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07- MENKES-1801-2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
10. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/2934/2022 tentang Rencana Aksi Program Dirjen Kesmas Tahun 2020-2024.

D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Loka Labkesmas Kupang sebagai UPT Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dihadapkan pada tantangan dan permasalahan, baik dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ataupun Penyakit Terabaikan. Permasalahan utama yang menjadi tantangan bagi Loka Labkesmas Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi :

1. Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Belum Optimal

Loka Labkesmas Kupang telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami permasalahan yaitu Pemerintah Daerah dalam wilayah binaan belum sepenuhnya memahami tentang konsep dan tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (staf) di Loka Labkesmas Kupang masih terbatas baik kualitas ataupun kuantitas. Pemerataan kemampuan yang terbatas sehingga masih terdapat SDM yang menjalankan tugas rangkap/ganda.

3. Karakteristik Wilayah Layanan

Loka Labkesmas Kupang memiliki dua wilayah binaan, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi NTT dengan 21 kabupaten dan 1 (satu) kota sedangkan Provinsi NTB dengan 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota. Provinsi NTT merupakan provinsi dengan 3 (tiga) pulau utama yaitu Pulau Timor, Pulau Flores dan Pulau Sumba. Wilayah binaan tersebut dengan permasalahan berbagai jenis penyakit dan karakter lingkungan yang berbeda, kondisi

wilayah yang mudah dijangkau maupun sulit dijangkau sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pelaksanaan kegiatan. Beberapa wilayah layanan Loka Labkesmas Kupang merupakan wilayah endemis seperti malaria, selain itu peningkatan penyakit lainnya seperti malaria, cacangan, DBD, HIV-AIDS, leptospirosis, tuberkulosis, keracunan makanan. Beberapa kegiatan surveilans yang dilakukan oleh Loka Labkesmas Kupang merupakan permintaan dari pemerintah daerah wilayah binaannya.

a. Surveilans Faktor Risiko Penularan Malaria pada Daerah Status Eliminasi dan Daerah Fokus Non Aktif

Daerah reseptifitas malaria dibagi menjadi daerah non reseptif dan daerah reseptif malaria, sedangkan daerah reseptif malaria dibagi menjadi daerah fokus, daerah non fokus dan daerah bebas. Perbedaan dari ketiga kategori daerah reseptif malaria ada pada terdapatnya kasus *Indegenious* kurun waktu tiga Tahun terakhir, daerah fokus adalah daerah dengan kasus *Indegenious* dalam kurun waktu tiga Tahun terakhir hingga Tahun berjalan, daerah non fokus adalah daerah yang terdapat kasus *Indegenious* terakhir dua Tahun yang lalu dan tidak ada kasus *Indegenious* kurun waktu satu Tahun terakhir dan daerah fokus bebas adalah daerah yang tidak ada terjadi kasus *Indegenious* kurun waktu tiga Tahun terakhir.

Pemetaan reseptifitas malaria diupayakan oleh daerah yang rencana mengajukan daerahnya sebagai daerah dengan status eliminasi malaria, sudah banyak daerah yang telah melakukan pemetaan reseptifitas malaria bahkan telah menggunakan aplikasi seperti aplikasi QGis, namun hampir tidak ada yang dapat melakukan pemeriksaan status *Anopheles sp.* sebagai vektor. Oleh karena itu, Loka Labkesmas Kupang berperan dalam memetakan status vektor pada daerah reseptif malaria baik daerah fokus aktif, daerah fokus non aktif maupun daerah fokus bebas.

b. Analisis Infeksi Kejadian Kecacangan pada Anak sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur dan Timor Tengah Utara (TTU)

Cacangan merupakan penyakit yang paling umum di seluruh dunia dan seringkali terjadi pada tiap negara khususnya negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang saat ini masih menghadapi tingginya prevalensi penyakit infeksi terutama penyakit yang berkaitan dengan kondisi sanitasi

lingkungan yang belum baik (World Health Organization 2018). Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dan memiliki kelembapan udara yang tinggi. Keadaan ini sangat mendukung *Soil Transmitted Helminths* (STH) untuk dapat berkembang dengan baik dan dapat menginfeksi manusia. Menurut *World Health Organization* pada Tahun 2016, lebih dari 1,5 milyar orang penduduk dunia terinfeksi STH. Angka kejadian terbesar berada di sub-Sahara Afrika, Amerika, Cina, dan Asia Timur.

Sekitar 60% dari 220 juta penduduk Indonesia menderita kecacingan, 21% diantaranya merupakan anak sekolah dasar dengan rata-rata per orang terdapat enam ekor cacing (Bedah & Syafitri 2018). Infeksi kecacingan banyak terjadi pada anak usia sekolah yaitu cacing STH. Cacing STH merupakan cacing usus yang menyebar melalui media tanah. Terdapat tiga jenis cacing STH di Indonesia yaitu cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*), cacing cambuk (*Trichuris trichiura*), dan cacing tambang (*Ancylostoma duodenale* dan *Necator Americanus*). Anak sekolah dasar merupakan masyarakat dengan kelompok antara usia 6-12 Tahun yang rentan terhadap infeksi cacing karena adanya kontak dengan tanah dan tidak memperhatikan kebersihan lingkungan.

Penyebab terinfeksinya penyakit kecacingan ini juga dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, sanitasi lingkungan yang buruk, dan perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang seperti pembuangan feses yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Tahun 2010, kerugian akibat penyakit kecacingan tidak terlihat secara langsung karena penyakit ini sering dianggap sepele oleh masyarakat. Penyakit ini dapat menyebabkan anemia, berat bayi lahir rendah (BBLR), gangguan persalinan, lemas, menurunnya status gizi anak, mengantuk hingga menurunkan produktivitas.

Penanggulangan penyakit kecacingan saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah untuk menekan prevalensi penyakit kecacingan di Indonesia yakni 28%. Beberapa upaya yang tengah dilakukan dalam menanggulangi kecacingan yaitu dengan pemberian obat secara masal pada masyarakat serta melakukan surveilans penyakit kecacingan. Surveilans Cacingan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian

cacingan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan cacingan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.

c. Surveilans Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* (*Ae.aegypti*) dan *Aedes albopictus* (*Ae.albopictus*) yang mengandung virus dengue dalam tubuhnya. Perlu dilakukan penyelidikan epidemiologi pada peningkatan kasus tersebut untuk merumuskan tindakan pencegahan dan penaggulangnya. Penyakit ini masih menjadi masalah utama di Masyarakat khususnya di Kabupaten Kupang, setiap Tahun selalu terjadi peningkatan kasus bahkan sampai saat ini masih terdapat kematian akibat DBD.

Surveilans DBD (Demam Berdarah Dengue) merupakan upaya pemantauan, pengumpulan data, dan analisis kasus Demam Berdarah Dengue di suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk mengetahui pola penyebaran penyakit, mengidentifikasi daerah yang berisiko tinggi, dan merencanakan tindakan pencegahan serta penanggulangan. Surveilans ini melibatkan pelaporan kasus oleh fasilitas kesehatan, pengumpulan data lingkungan, serta analisis tren epidemiologi untuk membantu pengambilan keputusan dalam penanganan DBD.

d. Surveilans HIV-AIDS (Skrining HIV Berbasis Komunitas di Kabupaten Sumba Timur)

Kementerian kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah orang yang mengetahui status HIV sampai 95% pada Tahun 2025. Hasil proyeksi Orang dengan HIV (ODHIV) Tahun 2019 menunjukkan bahwa 34% ODHIV berasal dari populasi kunci, dan 66% dari perempuan dan lelaki non populasi kunci, sehingga diperlukan inovasi serta upaya kesehatan masyarakat yang agresif untuk mencapai target penemuan kasus HIV hingga 95% baik pada populasi kunci dan non populasi kunci, termasuk di sini adalah pasangan ODHIV dan pasangan populasi kunci, serta laki-laki yang dapat dijangkau melalui program di tempat kerja.

Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah melakukan skrining HIV berbasis komunitas. Skrining HIV berbasis komunitas adalah pendekatan kesehatan masyarakat dengan deteksi dini HIV yang dilakukan di luar fasyankes, seperti di tempat penjangkauan, di tempat kerja, posyandu, dll. Penggunaan tes

cepat HIV dengan menggunakan cairan oral atau cukit jari merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk memudahkan pelaksanaan tes HIV mengingat keterbatasan tenaga kesehatan khususnya teknisi laboratorium dalam melakukan tes HIV dengan spesimen darah. Tes cepat HIV ditujukan sebagai sarana untuk melakukan penapisan (skrining) awal yang dilakukan secara mandiri dimana hasil reaktif akan dirujuk ke fasyankes untuk mendapatkan konfirmasi positif atau negatif dengan menggunakan alur diagnosis HIV. Hasil skrining HIV yang dilakukan secara mandiri sama akuratnya dengan tes HIV yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Skrining berbasis komunitas saat ini ditujukan kepada populasi kunci, yaitu Wanita Pekerja Seksual (WPS), klien WPS, Lelaki suka lelaki (LSL), Pengguna Napza Suntik (Penasun), dan Transpuan. Populasi prioritas lainnya adalah pasangan seksual ODHIV, pasangan populasi kunci, dan laki-laki yang dijangkau melalui program di tempat kerja. Populasi untuk skrining berbasis komunitas dapat diperluas sesuai dengan kemajuan pendekatan kesehatan masyarakat di masa mendatang.

Target eliminasi AIDS Tahun 2030 adalah *Triple 95* dan *Three Zero Triple 95* yaitu 95% Orang dengan HIV (ODHIV) mengetahui status mereka, 95% ODHIV mendapatkan pengobatan ARV (*Antiretroviral Therapy*), dan 95% ODHIV yang mendapatkan ARV berhasil menekan virus dalam tubuh mereka. *Three Zero* yaitu Nol kasus baru HIV, Nol kematian akibat HIV/AIDS, Nol stigma dan diskriminasi terhadap penderita. Untuk mencapai target tersebut diperlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk: Kolaborasi lintas sektor, Komisi Penanggulangan AIDS sebagai wadah koordinasi, Pelibatan komunitas dalam pengendalian AIDS. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah melakukan skrining HIV.

e. Surveilans Leptospirosis

Leptospirosis terjadi di berbagai belahan dunia tetapi pada umumnya di wilayah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang tinggi. Leptospirosis merupakan penyakit endemis di sejumlah negara bahkan di dunia. Sering memiliki distribusi musiman dan meningkat dengan adanya peningkatan curah hujan atau peningkatan temperatur bahkan penyakit ini dapat terjadi sepanjang

Tahun. Sejumlah negara di wilayah Asia Tenggara telah melaporkan adanya kasus Leptospirosis dari waktu ke waktu dan sebagian besar negara di wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah endemis Leptospirosis.

Besaran masalah Leptospirosis di setiap negara berbeda-beda dan sering dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosio-kultural, pekerjaan, perilaku dan faktor lingkungan. Risiko tertular Leptospirosis semakin tinggi di wilayah pedesaan dimana masyarakat sebagian besar merupakan petani atau peternak. Berdasarkan laporan beberapa Tahun terakhir, insiden kasus Leptospirosis secara global diperkirakan dari 0,1 – 1 per 100.000 per Tahun di daerah beriklim sedang dan 10 – 100 per 100.000 per Tahun di daerah tropik lembab. Insiden penyakit ini dapat mencapai lebih dari 100 per 100.000 per Tahun pada keadaan wabah dan paparan tinggi pada kelompok risiko. Pada Tahun 2007 terjadi peningkatan kasus Leptospirosis pada manusia, dilaporkan sebanyak 667 kasus dan 93% hasil laboratorium konfirmasi dengan angka kematian 8%. Pada Tahun 2010 kasus Leptospirosis di Indonesia dilaporkan sebanyak 410 kasus dengan 46 kasus kematian (CFR 11,2%).

Kasus-kasus tersebut ditemukan di delapan (8) provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan. Leptospirosis di Indonesia terutama disebarkan oleh tikus yang melepaskan bakteri melalui urin ke lingkungan. Reservoir yang tahan terhadap infeksi bakteri *Leptospira* tikus got (*Rattus Norvegicus*) kebun/ladang (*Rattus exulans*) akan menjadi sumber penularan pada manusia dan hewan. Sedangkan tikus yang peka terhadap infeksi bakteri *Leptospira* seperti tikus rumah Asia (*Rattus tanezumi*), tikus got (*Rattus norvegicus*), dll. Hewan-hewan lain yang berpotensi tertular Leptospirosis (babi, sapi, kambing, domba, kuda, anjing, kucing kelinci, bajing kucing, dll) dapat pula sebagai sumber penularan kepada manusia pada kondisi tertentu.

NTT merupakan salah satu provinsi yang belum dilaporkan memiliki kasus Leptospirosis sehingga perlu dilakukan deteksi dini Leptospirosis dengan survey tikus di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang untuk mendeteksi keberadaan bakteri *Leptospira* pada tikus. Loka Labkesmas Kupang mempunyai salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah membantu daerah dalam memberikan

informasi dan rekomendasi terkait pengambilan keputusan kebijakan program di daerah.

f. Surveilans Faktor Risiko Tuberkulosis di Pulau Sumba (Berbasis Laboratorium) Analisis Kegiatan *Follow Up* dan Kepatuhan Pengobatan di Kabupaten Sumba Tengah

Tuberculosis (TB) paru merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *mycobacterium tuberculosis*. Menurut WHO sepertiga penduduk dunia telah tertular tuberculosis (TB), Tahun 2000 lebih dari 8 juta penduduk dunia menderita TB aktif. Penyakit TB bertanggung jawab terhadap kematian hampir 2 juta penduduk setiap Tahun, sebagian besar terjadi di negara berkembang. Pada wanita kematian akibat TB lebih banyak dari pada kematian karena kehamilan, persalinan, dan nifas. Menurut perkiraan antara Tahun 2000– 2020 kematian karena TB meningkat sampai 35 juta orang. Setiap hari ditemukan 23.000 kasus TB aktif dan TB menyebabkan hampir 5000 kematian.

Estimasi insiden TBC Indonesia Tahun 2021 sebesar 969.000 atau 354 per 100.000 penduduk dan kematian karena TBC diperkirakan sebesar 144.000 atau 52 per 100.000 penduduk. Tahun 2000-2020 terjadi penurunan insiden TBC dan angka kematian TBC meskipun tidak terlalu tajam tetapi pada Tahun 2020-2021 terjadi peningkatan. Insiden TBC (18%), angka kematian TBC mengalami peningkatan 55%. Berdasarkan insiden TBC sebesar masih terdapat 25% yang belum ternotifikasi, baik yang belum terjangkau, belum terdeteksi maupun tidak dilaporkan. Estimasi kasus TBC MDR/RR Tahun 2021 sebesar 28.000 atau 10 per 100.000; bila dibandingkan dengan Tahun 2020 terdapat peningkatan sebesar 17% dari 24,000 dan rate per 100.000 penduduk sebesar 15%; Penemuan kasus TBC RO sebesar 12.531 dengan cakupan 51%.

Data Dinas Kesehatan Propinsi NTT Tahun 2021 menunjukkan angka kasus TB Paru seluruhnya pada Tahun 2019 sebanyak 7.024 kasus dan pada Tahun 2020 sebanyak 5.361 kasus, sedangkan pada Tahun 2021 sebanyak 5.184 kasus. Treatment Coverage (TC) adalah jumlah kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada Tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada Tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. TC menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh program, belum ada provinsi yang

mencapai angka TC \geq 85% pada Tahun 2021 termasuk Propinsi NTT. Salah satu kegiatan pengendalian penyakit menular terutama TB dapat berlangsung efektif, efisien dan tepat sasaran maka diperlukan suatu kegiatan surveilans epidemiologi dimana hasil kegiatan surveilans sangat menentukan tindakan pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan.

Berdasarkan data di atas Loka Labkesmas Kupang perlu melakukan kajian penemuan kasus dan pemantauan pengobatan TB di masyarakat di wilayah layanan Loka Labkesmas Kupang. Pelaksanaan survei meliputi skrining seluruh kontak kasus (100 kontak) perkabupaten, dan observasi lingkungan.

g. Surveilans Kewaspadaan Dini Keracunan Makanan

Keracunan makanan terjadi ketika bakteri atau patogen jenis tertentu yang membawa penyakit mengontaminasi makanan, dapat menyebabkan penyakit yang sering disebut dengan "keracunan makanan". Penyebab keracunan makanan bisa disebabkan agen pathogen yang berupa bakteri, jamur, bahan kimia dan logam berat lainnya. Bakteri yang kerap dikaitkan dengan kejadian keracunan makanan meliputi: Salmonella, Campylobacter, Listeria, Clostridium butolinum, dan Escherichia coli. (Centers for Diseases Control and Preventions, 2020) Kontaminasi bakteri ini dapat terjadi dalam penyediaan bahan mentah dan selama proses pengolahan, penyajian dan pengiriman, penyajian dan makanan yang kemungkinan terkontaminasi bakteri dan zat kimia. Gejala klinis yang kerap dialami oleh penderita dapat berupa mual, demam, sakit kepala, muntah, dehidrasi, sakit perut, lemas atau diare. Selain itu, tidak sedikit kasus keracunan makanan yang berujung pada kematian.

Menurut data WHO terdapat sekitar dua juta orang di dunia meninggal akibat keracunan makanan tiap Tahunnya. Data di Indonesia Tahun 2017 menunjukkan provinsi dengan KLB keracunan pangan tertinggi pada Tahun 2017 adalah Jawa Barat (25 kejadian), Jawa Tengah (17 kejadian), Jawa Timur (14 kejadian), Bali (13 kejadian), dan Nusa Tenggara Barat (12 kejadian). Secara keseluruhan kejadian keracunan makanan yang dilaporkan sepanjang Tahun 2017 mengakibatkan kesakitan pada 893 orang dan kematian pada 8 orang. Kasus dan kematian akibat keracunan makanan berkaitan erat dengan keamanan pangan.

Menurut WHO, keamanan pangan (foodsafety) adalah suatu ilmu yang

membahas tentang persiapan, penanganan, dan penyimpanan makanan atau minuman agar tidak terkontaminasi oleh bahan fisik, biologi, dan kimia. Tujuan utama keamanan pangan adalah untuk mencegah makanan dan minuman agar tidak terkontaminasi oleh zat asing baik fisik, biologi, maupun kimia sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya sakit akibat bahaya pangan. Kontaminasi fisik adalah benda asing yang masuk ke dalam makanan atau minuman.

Contohnya rambut, logam, plastik, kotoran, debu, kuku, dan lainnya. Arti dari kontaminasi biologi adalah suatu zat yang diproduksi oleh makhluk hidup (seperti manusia, tikus, kecoa, dan lainnya) yang masuk ke dalam makanan atau minuman. Kontaminasi kimia meliputi herbisida, pestisida, serta obat-obatan hewan.

Kontaminasi kimia juga ada yang bersumber dari lingkungan seperti udara atau tanah serta polusi air. Ada juga migrasi dari kemasan makanan, penggunaan zat adiktif atau racun alami, serta kontaminasi silang yang terjadi selama makanan diproses. Surveilans kewaspadaan dini keracunan makanan perlu dilakukan untuk memantau keamanan pangan dan meminimalkan faktor risiko terjadinya keracunan makanan. Surveilans kewaspadaan keracunan pangan dilakukan pada makan siap saji dan bahan makanan terhadap kontaminasi agent biologi dan kimia.

h. Surveilans Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Suatu kejadian penyakit dalam suatu wilayah dapat dikatakan Kejadian Luar Biasa jika : timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal, peningkatan kejadian penyakit/kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut (jam, hari, minggu, bulan), peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, Tahun), jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam Tahun sebelumnya

Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi ISPA di Indonesia Tahun 2018 dan 2013 menunjukkan penurunan yang signifikan yaitu 9,3% untuk Tahun 2018 dan 25% untuk Tahun 2013. Kondisi serupa terjadi pada prevalensi Pneumonia di Indonesia yang menunjukkan penurunan angka di Tahun 2018 yaitu 4,0%, dibanding Tahun 2013 yaitu 4,5%. Namun kondisi ini tidak terjadi pada TB, data Riskesdas Tahun 2018 dan 2013 menunjukkan angka yang tetap yaitu 0,4 untuk Tahun 2018 dan 2013. Pada prevalensi penyakit yang ditularkan melalui makanan, air dan lainnya yaitu prevalensi Hepatitis Tahun 2018 yang meningkat dua kali lebih tinggi dibanding Tahun 2013 yaitu 0,4% di Tahun 2018 dan 0,2% di Tahun 2013. Kondisi yang sama terjadi pada prevalensi diare untuk seluruh kelompok umur di Indonesia menunjukkan kenaikan yaitu dari 7% di Tahun 2013 menjadi 8%.

Pada Tahun 2018 laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) adalah laboratorium kesehatan pemerintah yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk deteksi dini, surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, dukungan terhadap respon kejadian luar biasa/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat serta melaksanakan fungsi lainnya dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam rangka transformasi layanan primer yang mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif dan transformasi sistem ketahanan kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, diperlukan penguatan layanan laboratorium kesehatan masyarakat. Laboratorium Kesehatan Masyarakat diharapkan dapat mendeteksi secara dini penyakit dan faktor risiko kesehatan serta penguatan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

E. Struktur Organisasi

Berdasarkan Permenkes Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis (UPT) Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Struktur organisasi Loka Labkesmas Kupang terdiri dari:

1. Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang
2. Kasubbag Administrasi Umum

Urusan Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Jabatan Fungsional yang saat ini ada di Loka Labkesmas Kupang adalah Pranata Laboratorium, Epidemiologi Kesehatan, Entomologi Kesehatan, Dokter, K3, Teknik Elektromedis, Promkes, Sanitarian, Adminkes, Teknisi Litkayasa terampil, Arsiparis, Pengelolah Keuangan APBN, Perencana, Pranata Komputer, Pengelolah BMN dan jabatan fungsional umum.

4. Instalasi Laboratorium

Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Labkesmas Kupang. Instalasi laboratorium merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pengendalian kesehatan.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Loka Labkesmas Kupang:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Loka Labkesmas Kupang

Unsur Dukungan Manajemen Loka Labkesmas Kupang meliputi:

1. Sumber daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah institusi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan institusi. Tantangan yang dihadapi untuk menjalankan fungsi Loka Labkesmas adalah pemenuhan SDM yang belum bisa dilakukan karena struktur SDM dan peta jabatan masih mengacu pada peta jabatan sebelumnya. Kehadiran Labkesmas kedepannya dapat memberikan penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan sehingga diperlukan unit pelaksana teknis yang mampu melakukan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat.

SDM Loka Labkesmas Kupang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah 24 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 15 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1 orang dan tenaga Outsourcing sebanyak 16 orang dan tenaga supporting INPULS sebanyak 1 orang. Berdasarkan SIMKA 2025 terdapat jumlah ASN Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025 sebanyak 40 orang PNS, Adapun rekapitulasi ASN Loka Labkesmas Kupang berdasarkan jenis kelamin, golongan dan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Loka Labkesmas Kupang berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	21
2	Perempuan	19
Total		40

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Loka Labkesmas Kupang berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan III	29
2	Golongan II	9
3	Golongan I	1
4	Golongan IX	1
Total		40

c. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Loka Labkesmas Kupang berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Doktoral (S3)	1
2	Pasca Sarjana (S2)	5
3	Sarjana	21
4	Diploma III (D3)	9
5	SMA	4
Total		40

d. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan jabatan Pegawai Loka Labkesmas Kupang dibedakan menjadi jabatan struktural, jabatan fungsional Pranata Laboratorium, Epidemiologi Kesehatan, Entomologi Kesehatan, Dokter, K3, Teknik Elektromedis, Promkes, Sanitarian, Adminkes, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pengelola Keuangan APBN, Perencana, Pranata Komputer, Pengelola BMN dan jabatan fungsional umum. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Loka Labkesmas Kupang berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang	1
2	Kepala Subbagian Administrasi Umum	1
3	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	2
4	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Terampil	2
5	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	3
6	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	5
7	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1
8	Entomologi Kesehatan Ahli Pertama	2
9	Dokter Ahli Pertama (JP)	1
10	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	2
11	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	1
12	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama/Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama (JP)	1
13	Teknisi Litkayasa Terampil	2
14	Teknisi Elektromedis Terampil	1
15	Sanitarian Ahli Pertama	1
16	Sanitarian Terampil	1
17	Arsiparis Terampil	1
18	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
19	Pranata keuangan APBN Penyelia	1
20	Pranata keuangan APBN Terampil	1
21	Perencana Ahli Pertama	1

No	Jabatan	Jumlah
22	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
23	Penata Kelola Layanan Kesehatan	2
24	Penata Layanan Operasional	1
25	Pengelola Layanan Operasional	1
26	Operator Layanan Operasional	1
	Total	40

Pegawai Loka Labkesmas Kupang yang sementara menempuh pendidikan S1 pada Universitas Terbuka sebanyak 3 orang (IBEL).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

Visi Kementerian/Lembaga

Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Selaras dengan visi pada RPJMN 2025-2029, Kementerian Kesehatan menetapkan visi 2025-2029, yaitu Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Misi Kementerian/Lembaga

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Prioritas nasional (PN) ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
2. Membudayakan gaya hidup sehat
3. Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau
4. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive
5. Menguatkan tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
7. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien

Tujuan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka pencapaian visi, ditetapkan 7 (tujuh) tujuan Kementerian Kesehatan untuk 5 (lima) Tahun kedepan yaitu:

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
2. Masyarakat berperilaku hidup sehat

3. Layanan Kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau
4. Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif
5. Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif
6. Teknologi Kesehatan yang Maju
7. Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien

Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis (ISS)
1.	Masyarakat sehat di setiap siklus hidup	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan promotif dan preventif	<ul style="list-style-type: none"> ● Angka Kematian Ibu ● Angka Kematian Balita ● Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) ● Angka harapan hidup sehat pada umur 60 Tahun (HALE60) ● Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis ● Prevalensi depresi di umur \geq 15 Tahun ● Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kekebalan kelompok ● Angka populasi bebas PTM ● Angka populasi bebas PM
		1.2	Meningkatnya literasi kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase penduduk depan literasi kesehatan ● Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup ● Kabupaten/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ● Prevalensi obesitas > 18 Tahun

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis (ISS)
2.	Layanan Kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau	2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar ● Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar ● Persentase fasilitas pelayanan kesehatan mencapai akreditasi paripurna ● Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan ● Persentase Belanja Kesehatan <i>Out of Pocket</i> ● Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif ● Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi
3.	Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif	3.1	Meningkatnya kualitas sistem ketahanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ● Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri ● Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri ● Indeks alat kesehatan yang memenuhi standar ● Nilai kapasitas International Health Regulations (IHR) dalam <i>Joint External Evaluation</i> (JEE) ● Kabupaten/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan

Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis (ISS)
4	Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif	4.1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target Tahunan pembangunan ● Pengeluaran kesehatan total per kapita ● Skala inventasi di sektor kesehatan
5	Teknologi Kesehatan yang Maju	5.1	Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis	<ul style="list-style-type: none"> ● Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional ● Persentase masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui SIKN ● Pertumbuhan layanan kesehatan berbasis kedokteran presisi yang diimplementasikan ● Peningkatan kapabilitas uji klinik di Indonesia
6	Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien	6.1	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ● Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

B. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung kebijakan nasional, Kementerian Kesehatan dalam Renstra telah menyusun kebijakan dan strategi hingga Tahun 2029. Kebijakan dan strategi ini menjadi acuan dalam menyusun program Kementerian Kesehatan hingga Tahun 2029, yang merupakan operasionalisasi dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang sudah disusun sebelumnya. Kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dirumuskan sebagai perwujudan dari transformasi kesehatan yang mencakup transformasi enam pilar pada (1) Layanan primer, (2) Layanan Lanjutan, (3) Sistem ketahanan kesehatan, (4) Tata kelola dan Pembiayaan Kesehatan, (5) SDM Kesehatan, dan (6) teknologi kesehatan. Target kinerja Kementerian Kesehatan hingga 2029 akan menjadi acuan kinerja dalam 5 Tahun mendatang.



Adapun rincian indikator dan target kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas adalah sebagai berikut

Tabel 2.2 Target Kinerja Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	SS 1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan promotif dan preventif	Indikator Tujuan 1	122 per	109 per	97 per	86 per	77 per
		ISS 1. Angka Kematian Ibu	100.000 kelahiran hidup	100.000 kelahiran hidup	100.000 kelahiran hidup	100.000 kelahiran hidup	100.000 kelahiran hidup
		ISS 2. Angka Kematian Balita	15 per 1.000 kelahiran hidup	13,8 per 1.000 kelahiran hidup	13,1 per 1.000 kelahiran hidup	12,5 per 1.000 kelahiran hidup	11,9 per 1.000 kelahiran hidup
		ISS 3. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	18,9%	17,5%	16,3%	15,2%	14,2%
		ISS 4. Angka harapan hidup sehat pada umur 60 Tahun (HALE60)	13,9% (Angka)	14,0% (Angka)	14,10% (Angka)	14,2 (Angka)	14,2 (Angka)
		ISS 5. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	36%	46%	55%	61%	70%
	ISS 6. Prevalensi Depresi di Umur \geq 15 Tahun	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	
	SS 1.2 Meningkatkan literasi kesehatan masyarakat	ISS. 10 Persentase Penduduk dengan Literasi Kesehatan	38,3%	40,3%	42,3%	44,3%	46,3%
ISS 11. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup		65%	68%	71%	75%	80%	
2	SS 2.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes	ISS 16. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	33%	36,5%	44%	62,5%	75,5%
		ISS 17. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	77 (Nilai)	78 (Nilai)	79 (Nilai)	79 (Nilai)	80 (Nilai)

Target kinerja program dan target kinerja kegiatan Kementerian kesehatan akan menggambarkan target kinerja yang menjadi tugas dari unit kerja yang ada di Kementerian Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, maka setiap unit kerja di Kementerian Kesehatan akan memiliki satu atau lebih indikator kinerja berikut dengan target dan indikasi kebutuhan pendanaannya.

C. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) biasanya berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya laboratorium. Berikut adalah beberapa sasaran strategis yang mungkin dimiliki oleh Labkesmas :

1. **Peningkatan Kapasitas Laboratorium** : Meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen laboratorium untuk memastikan hasil yang akurat dan andal dalam waktu yang cepat.
2. **Penguatan Sistem Pengawasan dan Monitoring** : Mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan dan monitoring yang efektif untuk mendeteksi dan menanggapi masalah kesehatan masyarakat secara tepat waktu.
3. **Pengembangan Sumber Daya Manusia** : Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, pendidikan, dan pengembangan profesional.
4. **Peningkatan Akses dan Cakupan Pelayanan** : Memastikan akses yang lebih luas ke layanan laboratorium kesehatan masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan kurang terlayani.
5. **Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan** : Memperkuat kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, organisasi internasional, dan sektor swasta, untuk mendukung upaya kesehatan masyarakat.
6. **Inovasi dan Pengembangan Teknologi** : Mengadopsi teknologi baru dan inovasi dalam prosedur laboratorium untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil.
7. **Peningkatan Kualitas Manajemen dan Akreditasi** : Meningkatkan kualitas manajemen laboratorium dengan mendapatkan dan mempertahankan akreditasi nasional dan internasional.
8. **Peningkatan Keamanan dan Keselamatan** : Memastikan penerapan standar keamanan dan keselamatan di laboratorium untuk melindungi staf, pasien, dan

lingkungan.

D. Perjanjian Kinerja Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025

Loka Labkesmas Kupang sebagai salah satu instansi pemerintah, memiliki kewajiban untuk menyusun target kerja dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk penerapan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Sesuai Permen PAN/RB no. 53 Tahun 2014. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja Loka Labkesmas Kupang mencakup kinerja yang diperjanjikan oleh pihak penyusun dokumen. Perjanjian Kinerja merupakan perjanjian antara (yang ditandatangani) oleh Kepala Loka Labkesmas Kupang dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A	Sasaran Strategis (8)		
	Menguatnya Surveilans yang adekuat		
I	Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Sasaran Program : Meningkatnya Kemampuan surveilans berbasis laboratorium		
1	Kegiatan : Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
1	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling, dan biologi kesehatan	1	Persentase Labkesmas yang melaksanakan fungsi surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium sesuai standar
		2	Persentase Labkesmas yang melaksanakan pemeriksaan spesimen klinis dan lingkungan sesuai standar
		3	Persentase Labkesmas yang dilakukan pembinaan secara rutin dan berjenjang

2	Sasaran kegiatan UPT :Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesliing dan biologi kesehatan	1	Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	5 rekomendasi
		2	Jumlah Pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 Spesimen klinis
		3	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di Labkesmas	100%
		4	Mengikuti dan lulus Pemantauan Mutu Eksternal (PME)	2 Kali
		5	Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, Lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	5 Mou/PKS/Laporan
		6	Labkesmas Memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100%
B	Sasaran Strategis (17)			
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik			
II	Program : Dukungan Manajemen			
	Sasaran Program : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan			
2	Sasaran Kegiatan UPT: Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	1	Persentase realisasi anggaran	96%
		2	Nilai Kinerja Anggaran	80,1 NKA
		3	Kinerja Implementasi WBK Satker	75 Skala
		4	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%
		5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas*	95%

	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Rp. 2.886.103.000,-
2	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat	Rp. 7.289.238.000,-

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja revisi Renstra Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Kegiatan: Peningkatan fasilitas, mutu dan tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat			
1	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola Labkesmas	16.1.1.a Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 Spesimen klinis dan/atau sampel
		16.1.1.b. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	5 Rekomendasi
		16.1.1.c Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100%
		16.1.1.d. Jumlah MoU/PKS/Forum Kerja Sama atau forum koordinasi jejaring, Lembaga/Institusi nasional dan/atau internasional	5 MoU/PKS/Laporan
2	Meningkatnya kualitas fasilitas dan mutu labkesmas	16.1.e. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 Kali
		14.4.g. Labkesmas Memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	100%
Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan di Labkesmas			
1	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	33.1.3 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas	77 (Nilai)
		33.2.3 Nilai Kinerja Anggaran Labkesmas	92,35 (Nilai)
		33.3.3 Indeks Kualitas SDM	81 (Nilai)

		Labkesmas	
		33.4.12 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)	3,95 (Nilai)
		IKD 33.1 Persentase Realisasi Anggaran Labkesmas	96%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan fasilitas, mutu dan tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Rp. 2.546.139.000
2	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan di Labkesmas	Rp. 7.629.202.000
	Total Anggaran DIPA Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang	Rp. 10.175.341.000



E. Analisis SMART Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kupang Tahun 2025

Tabel 2.5. Analisis Smart Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025

NO	INDIKATOR	KRITERIA SMART				
		Spesitik	Measurable	Achievable	Relevance	Timebound
A	Meningkatnya Jumlah dan Kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan					
1	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	Indikator kinerja telah spesifik menyebut jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	Jelas parameter dapat diukur yaitu 5 rekomendasi <i>Cara pengukuran terlampir</i>	Indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, Peralatan dan Anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategis eselon 1 (Ditjen Kesprimkom)	Dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun
2	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/ atau sampel	Indikator kinerja telah spesifik menyebut jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan / atau sampel	Jelas parameter dapat diukur yaitu 10.000 spesimen klinis dan/ atau sampel <i>Cara pengukuran terlampir</i>	Indikator memungkinkan untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, Peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategi eselon 1 ((Ditjen Kesprimkom)	Dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun
3	Persentase bimbingan secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT	Indikator kinerja telah spesifik menyebut persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT	Jelas parameter dapat diukur yaitu 100% <i>Cara pengukuran terlampir</i>	Indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, Peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategi eselon 1 ((Ditjen Kesprimkom)	Dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun
4	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	Indikator kinerja telah spesifik menyebut mengikuti dan lulus	Jelas parameter dapat diukur yaitu	Indikator memungkinkan	Indikator relevan karena sudah	Dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun



		Pematapan Mutu Eksternal (PME)	2 kali. Cara Pengukuran terlampir.	(realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, Peralatan dan anggaran)	sesuai dengan sasaran strategi eselon 1 (Ditjen Kesprimkom)	
5	Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, Lembaga/Institusi nasional dan / atau internasional	Indikator kinerja telah spesifik menyebut jumlah MoU/PKS/Forum Indikator Kinerja telah spesifik menyebut kerjasama atau forum koordinasi dengan jejaring, Lembaga/Institusi nasional dan/ atau internasional	Jelas parameter dapat diukur yaitu 5 MoU/PKS/Laporan Cara Pengukuran terlampir	Indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, Peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategi eselon 1 (Ditjen Kesprimkom)	Dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun
6	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	Indikator kinerja telah spesifik menyebut labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	Jelas parameter dapat diukur yaitu 100% Cara pengukuran terlampir	Indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, Peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategi eselon 1 ((Ditjen Kesprimkom)	Dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun
B	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksana tugas lainnya					
7	Persentase realisasi anggaran	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Persentase realisasi anggaran	Jelas parameter dapat diukur yaitu 96% <i>Cara Pengukuran terlampir</i>	Indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, Peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategi eselon 1 (Ditjen Kesprimkom)	Dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun
8	Nilai Kinerja Anggaran	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Nilai Kinerja Anggaran	Jelas parameter dapat diukur 95 NKA <i>Cara Pengukuran terlampir</i>	Indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, Peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategi eselon 1 (Ditjen Kesprimkom)	Dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun
9	Kinerja implementasi WBK Satker	Indikator kinerja telah spesifik	Jelas parameter	Indikator	Indikator relevan	Dicapai dalam kurun



		menyebut kinerja implementasi WKB Satker	dapat diukur yaitu 75 skala <i>Cara Pengukuran terlampir</i>	memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, Peralatan dan anggaran)	karena sudah sesuai dengan sasaran strategi eselon 1 (Ditjen Kesprimkom)	waktu 1 Tahun
10	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Persentase ASN Yang ditingkatkan kompetensinya	Jelas parameter dapat diukur yaitu 80% <i>Cara Pengukuran terlampir</i>	Indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, Peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategi eselon 1 (Ditjen Kesprimkom)	Dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun
11	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas	Jelas parameter dapat diukur 77 (Nilai) . <i>Cara Pengukuran terlampir</i>	Indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, Peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategi eselon 1 (Ditjen Kesprimkom)	Dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun
12	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintergrasi (SPIPT)	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintergrasi (SPIPT)	Jelas parameter dapat diukur 3,95 (Nilai) . <i>Cara Pengukuran terlampir</i>	Indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, Peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategi eselon 1 (Ditjen Kesprimkom)	Dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun
13	Indeks Kualitas SDM Labkesmas	Indikator kinerja telah spesifik menyebut Indeks Kualitas SDM Labkesmas	Jelas parameter dapat diukur 81 (Nilai) . <i>Cara Pengukuran terlampir</i>	Indikator memungkinkan (realistis) untuk dapat dicapai karena sumber daya mencukupi (baik SDM, Peralatan dan anggaran)	Indikator relevan karena sudah sesuai dengan sasaran strategi eselon 1 (Ditjen Kesprimkom)	Dicapai dalam kurun waktu 1 Tahun



F. Indikator Perjanjian Kinerja UPT Labkesmas Tahun 2025

Tabel 2.6 Indikator Perjanjian Kinerja UPT Labkesmas Tahun 2025

NO	INDIKATOR	INDIKATOR PK UPT			
		DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2025	CARA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	Jumlah Rekomendasi Hasil Surveilans berbasis laboratorium	<p>1. Surveilans adalah pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan, untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.</p> <p>2. Lingkup surveilans berbasis laboratorium mencakup:</p> <p>a. Skrining faktor risiko penyakit tidak menular dan atau penyakit menular dan atau faktor risiko kesehatan lingkungan dan atau vektor dan binatang pembawa penyakit</p> <p>b. Surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium</p> <p>c. Faktor risiko kesehatan adalah hal-hal yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan</p> <p>3. Tahapan surveilans mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis data intervensi dan diseminasi/rekomendasi/ laporan (Sumber: pedoman surveilans berbasis laboratorium dan twinning program)</p> <p>4. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium adalah banyaknya rekomendasi dihasilkan dari hasil sintesa satu atau beberapa hasil surveilans penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratoriu, untuk memperoleh dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Labkesmas Tingkat 5 dan Koordinator Labkesmas Regional : 12 Rekomendasi • Labkesmas Tier 4 Lainnya : 5 rekomendasi 	Penjumlahan rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun	<p>a. Mengakomodir 5 fungsi Labkesmas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon, wabah dan bencana 2). Pengelolaan dan analisis data laboratorium 3). Analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium 4). Pengembangan teknologi tepat guna 5). Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program kesehatan <p>b. Merupakan target Tahunan untuk semua UPT Labkesmas</p>



		memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien dalam bentuk naskah rekomendasi atau saran yang mencakup lingkup wilayah binaan dan/ atau regional			
2	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/ atau pengujian sampel	<ol style="list-style-type: none"> Spesimen klinis adalah bahan yang berasal dan/ atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/ atau analisis lainnya, termasuk new-emerging dan re-emerging, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik Sampel adalah bahan yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit untuk tujuan pengujian dalam rangka penetapan penyakit dan faktor risiko kesehatan lain berbasis laboratorium 	10.000 pemeriksaan spesimen dan / atau pengujian sampel	Penjumlahan pemeriksaan spesimen klinis dan/atau pengujian sampel dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun	<ol style="list-style-type: none"> Mengakomodir 3 fungsi Labkesmas: <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan spesimen klinik Pengujian sampel Pengelolaan logistik khusus laboratorium Target merupakan target Tahunan untuk semua UPT Labkesmas
3	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang	<ol style="list-style-type: none"> Bimbingan teknis mencakup manajerial (perencanaan, penggerakan-pelaksanaan, monitoring evaluasi) dan pembinaan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan. Sasaran pembinaan: <ol style="list-style-type: none"> Labkesmas Tingkat 4 Labkesmas Tingkat 3 dan 50% Labkesmas Tingkat 2 *) khusus UPT Balai Labkesmas Papua ditambahkan sasaran 10% Labkesmas tingkat 1 (karena belum memiliki Labkesda Kabupaten/Kota) Labkesmas Tingkat 5 Labkesmas Regional mencakup 11 Labkesmas Koordinator Regional dan 10 Labkesmas Tingkat 4 lainnya. Metode bimbingan teknis: pendampingan/koordinasi terkait manajemen maupun teknis labkesmas dalam bentuk kunjungan lapangan/ pertemuan luring atau daring/peningkatan kapasitas dengan minimal 2 kali dalam seTahun. Aspek pembinaan pada penguatan pelaksanaan fungsi dan pemenuhan standar Labkesmas Ruang Lingkup pembinaan Labkesmas Tingkat 5: 	100%	Labkesmas Tingkat 4 Jumlah labkesmas Tingkat 3 dan 50% Labkesmas Tingkat 2, dan khusus Papua ditambahkan Labkesmas Tingkat 1 (10%) di wilayah binaan yang dilaksanakan bimbingan teknis oleh UPT Labkesmas dibagi Jumlah labkesmas Tingkat 3 dan 50% Labkesmas Tingkat 2, dan khusus Papua ditambahkan Labkesmas Tingkat 1 (10%) di wilayah binaan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun di kalikan 100%	<ol style="list-style-type: none"> Mengakomodir 2 Fungsi Labkesmas: <ol style="list-style-type: none"> Komunikasi dengan pemangku kepentingan Penguatan kapasitas sumber daya manusia Target merupakan target Tahunan untuk semua UPT Labkesmas



		<p>a. BB Lab Biokes : Pemeriksaan spesimen klinis</p> <p>b. BB Lab Kesling : Pengujian sampel</p> <p>5. Wilayah binaan ditetapkan melalui Kepdirjen Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/154/2024 tentang Penetapan Wilayah Binaan Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Ditjen Kesmas</p> <p>6. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas adalah persentase Labkesmas di Wilayah binaan yang dilaksanakan bimbingan teknis</p>			
4	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	<p>1. Pemantapan Mutu Eksternal (PME) adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain diluar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu</p> <p>2. PME mencakup mengikuti atau menjadi peserta uji profesiensi untuk spesimen klinis/sampel pada instansi penyelenggara yang sudah terakreditasi dan atau instansi laboratorium lainnya dalam kurun waktu satu Tahun</p> <p>3. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) adalah UPT Labkesmas yang mengikuti dan menjadi peserta PME yang di selenggarakan oleh lembaga penyelenggara PME dan hasilnya dinyatakan lulus/baik/sesuai/memuaskan dan/ atau kriteria kelulusan lainnya</p>	2 kali	Penjumlahan keikutsertaan Labkesmas menjadi peserta PME dan lulus dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun	<p>a. Mengakomodir 1 fungsi Labkesmas:</p> <p>1. Pelaksanaan Mutu Eksternal (PME)</p> <p>b. Target merupakan target Tahunan untuk semua UPT Labkesmas</p>
5	Jumlah MoU/PKS/ Forum Kerjasama atau Forum koordinasi dengan jejaring, lembaga.institusi nasional dan /atau internasional	<p>1. Jejaring Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah suatu sistem kerja sama atau keterkaitan laboratorium kesehatan masyarakat dengan laboratorium lain dalam rangka surveilans penyakit menular, tidak menular dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, penjaminan mutu, kesiapsiagaan dalam menghadapi KLB/Wabah/KKM dan kerjasama lainnya guna memadukan kemampuan berbsama untuk mencapai sistem kesehatan yang tangguh</p> <p>2. Kerjasama adalah semua kegiatan kemitraan atau kerjasama dengan jejaring dan/ atau institusi nasional dan/atau institusi internasional terkait layanan pemeriksaan /pengujian laboratorium/ magang/penelitian/fasilitator/narasumber/pendidikan</p>	5 dokumen	Penjumlahan MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan / atau internasional dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun	<p>a. Mengakomodir 1 fungsi Labkesmas:</p> <p>1. Pengkoordinasian jejaring laboratorium kesehatan</p> <p>2. Kerjasama dengan Lembaga/institusi nasional dan / atau institusi internasional</p> <p>b. Target merupakan target Tahunan untuk semua UPT Labkesmas</p>



		dan pelatihan yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun			
6	Memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	<p>1. Biorepositori merupakan fasilitas dan metode penyimpanan materi biologi beserta data identitas dan informasinya dalam waktu yang lama (lebih dari 1 Tahun). Materi biologi digunakan uji konfirmasi: kontrol positif, pembandingan varian atau subtype tertentu hasil mutasi; pembuatan standar baku; dan mendukung kegiatan kajian serta riset.</p> <p>2. Penyelenggaraan biorepositori untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, dampak keamanan dan keselamatan masyarakat serta bioterrorism lainnya</p> <p>3. Penyelenggaraan biorepositori memperhatikan tingkat risiko dan menerapkan <i>biosafety dan biosecurity</i></p> <p>4. Standar minimal pengelolaan sistem biorepositori, mencakup:</p> <p>a. Sarana prasarana: ketersediaan ruangan tempat khusus, akses terbatas, CCTV, kapasitas Revco penyimpanan</p> <p>b. SDM : Kualifikasi SDM lengkap sesuai standar, sudah mendapat pelatihan biorepository</p> <p>c. Spesimen dan atau/ atau / sampel : jumlah spesimen dan /atau sampel yang terhubung dengan informasi identitas dan asal spesimen/sampel sebanyak minimal 1000 spesimen dan /atau sampel (baik secara manual maupun elektronik)</p> <p>d. SOP : tersedia SOP pengelolaan sistem biorepositori</p>	100%	Jumlah standar sistem pengelolaan biorepositori yang dimiliki dibagi dengan jumlah standar minimal pengelolaan biorepositori dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun dikalikan 100 %	<p>a. Mengakomodir 1 fungsi Labkesmas:</p> <p>1. Pengelolaan biorepositori spesimen klinik dan sampel</p> <p>b. Target merupakan target Tahunan untuk semua UPT Labkesmas</p>
7	Nilai Kinerja Anggaran	<p>Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari:</p> <p>1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara Tahunan</p> <p>2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditargetkan di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara Tahunan</p>	Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan	Target dan capaian NKA dihitung kumulatif. Contoh: Target Januari 0, Februari 0, Maret 5, April 10 dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK	Aplikasi E Monev DJA (dashboard nilai SMART)



		3. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamikamasaalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program			
8	Kinerja Implementasi WBK Satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (<i>self Assesment</i>) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	Target dan capaian kinerja implementasi satker dihitung bulanan Contoh: Januari 75, Feb 75 dan seterusnya sampai Desember 75. Capaian diperoleh dari: 1. Hasil self assesment satker 2. Hasil SIPINAL 3. Hasil assesment Itjen 4. Hasil assesment Bagian HOH Contoh perhitungan capaian: Bulan Jan-Feb belum ada penilaian maka capaian menggunakan hasil capaian Desember Tahun sebelumnya. Bulan Maret input Spinal capaian 72, bulan Maret-Mei diinput capaian 72, bulan Juni hasil assesment Itjen capaian 75 pada bulan Juni sd Okt, bulan Nov penilaian Hukormas nilai 76, diinput Nov-Des capaian 76 Capaian yang dimasukkan dalam laporan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil self assesment ▪ Hasil SIPINAL ▪ Hasil assesment Itjen ▪ Hasil assesment Tim Kerja HOH Nilai yang diinput adalah nilaiterakhir periode penilaian



				adalah hasil terakhir yang dilakukan dalam periode penilaian	
9	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) Tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	Target dan Capaian dihitung kumulatif. Contoh: Target Januari 5%, Februari 10%, Maret 15% dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK	1. Instrumen Perhitungan 2. Laporan peningkatan kapasitas ASN dilampirkan sertifikat/surat tugas
10	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada Kemenkes dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat BPK dan tercatat dalam Hasil Pemantauan Semester (HAPSEM) BPK	Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100%	Target dan Capaian dihitung kumulatif. Contoh: Target Januari 0%, Februari 0%, Maret 40%, April 50% dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK (92.5%)	1. Surat Rekap Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 2. Berita Acara Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 3. Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
11	Persentase realisasi anggaran	Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu Tahun anggaran	Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%	Target dan Capaian dihitung kumulatif. Contoh: Target Januari 5%, Februari 10%, Maret 15% dan seterusnya. Target Desember adalah target dalam PK (95%)	OMSPAN
12	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas	Hasil penilaian kepuasan pengguna layanan dari seluruh pengguna layanan (internal dan eksternal) di Ditjen Kesprimkom yang diperoleh melalui pengukuran berdasarkan survei kepada responden terpilih dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait Permenpan-RB tersebut.	77	Nilai indeks kepuasan pengguna layanan diperoleh dengan cara menghitung hasil survei berdasarkan 9 unsur layanan	Hasil survei pihak ketiga



13	Indeks Kualitas SDM Labkesmas	Ukuran yang menggambarkan kualitas ASN Kemenkes di Lingkungan Eselon I berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Dalam hal pelaksanaan pengukuran, mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh <i>leading institution</i> yang disesuaikan	81	Hasil penjumlahan dari nilai Penerapan dimensi profesionalitas ASN sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019	Data Kemenkes
14	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)	Nilai maturitas manajemen risiko Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dari hasil penilaian APiP Kemenkes yang mengacu pada Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	3,95	Hasil penilaian maturitas manajemen risiko Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas di Tahun berjalan dengan kategori yaitu: - <i>Naive</i> : ≤1 - <i>Aware</i> : 1,01 – 2,00 - <i>Define</i> : 2,01 – 3,00 - <i>Manage</i> : 3,01 – 4,00 - <i>Enable</i> : 4,01 – 5,00	Hasil Penilaian APiP atas MRI

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kupang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja. Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang laboratorium kesehatan masyarakat. Capaian kinerja organisasi diukur melalui indikator-indikator kinerja kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan secara obyektif untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, serta efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Secara umum, kinerja Loka Labkesmas Kupang pada Tahun pelaporan menunjukkan hasil yang positif, dengan sebagian besar indikator mencapai atau mendekati target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari aspek teknis, administratif, maupun koordinasi lintas sektor. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Melalui pengukuran kinerja diperoleh gambaran pencapaian masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Adapun gambaran capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 per indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Labkesmas

Adapun uraian target dan realisasi IKK pada Sasaran Kegiatan 1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian IKK Pada Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Labkesmas Tahun 2025.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Satuan
		Target		Capaian		
		2024	2025	2024	2025	
1	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000	10.000	13.909 (139.09%)	25.090 (250.9%)	Pemeriksaan
2	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	5	5	6 (120%)	12 (240%)	Rekomendasi
3	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Lamkesmas	100	100	100 (100%)	100 (100%)	Persen
4	Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	5	5	6 (120%)	12 (240)	MoU/PKS/Laporan

1.1 Jumlah Pemeriksaan Spesimen Klinis dan/atau Sampel

Dalam rangka mendukung upaya deteksi dini, respons cepat, dan pengendalian penyakit berbasis laboratorium, Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang secara rutin melaksanakan pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel lingkungan. Pada Tahun 2025 pemeriksaan ini mencakup 9 (Sembilan) kegiatan surveilans yaitu sebagai berikut:

1. Surveilans Faktor Resiko Penularan Malaria pada Daerah Status Eliminasi dan daerah Fokus Non-Aktif Surveilans Kewaspadaan Dini Keracunan Makanan
2. Surveilans Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
3. Analisis Infeksi Kejadian Kecacangan pada Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur
4. Surveilans Demam Berdarah Dengue (DBD)
5. Surveilans Faktor Risiko Tuberkulosis (TB) di Pulau Sumba (Surveilans Berbasis Laboratorium) Analisis Kegiatan Follow up dan Kepatuhan Pengobatan di Kabupaten

Sumba Tengah

6. Surveilans HIV Berbasis Komunitas di Kabupaten Sumba Timur
7. Surveilans Leptospirosis
8. Surveilans Kewaspadaan Dini Keracunan Makanan
9. Surveilans Kolaborasi dengan BBLKL Salatiga Penyakit Zoonis (Hantavirus & Leptospirosis)

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Pemeriksaan Spesimen Klinis dan/atau Sampel

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi
1 Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000	25.090	250,9%

Berdasarkan tabel di atas jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel Tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 25.090 spesimen/sampel oleh Loka Labkesmas Kupang. Pemeriksaan sampel disajikan lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Pemeriksaan Spesimen Klinis dan/atau Sampel Kegiatan Surveilans Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan Surveilans	Realisasi Kegiatan		
		Jenis Sampel	Capaian Tahun 2025	Tahap Pengumpulan data
1	Surveilans Faktor Resiko Penularan Malaria pada Daerah Status Eliminasi dan daerah Fokus Non-Aktif	Darah Sediaan Tipis/Tebal	3.074	Kabupaten TTS Tahap I,II,III dan V Kabupaten Kupang Tahap I,II,III, dan V Kota Kupang Tahap I,II,III,V Kabupaten Sumba Timur tahap I dan II
2	Surveilans Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Multi- sampel	6.792	Kab. TTS Tahap I dan II Kota Kupang Tahap I
3	Analisis Infeksi	feses	989	Tahap I dan II Kab Sumba

No	Jenis Kegiatan Surveilans	Realisasi Kegiatan		
		Jenis Sampel	Capaian Tahun 2025	Tahap Pengumpulan data
	Kejadian Kecacangan pada Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur			Timur (30 SD) Kab TTU (15 SD)
4	Surveilans Demam Berdarah Dengue (DBD)	Darah Sediaan/Serum	10.628	Kab. SBD
5	Surveilans Faktor Risiko Tuberkulosis (TB) di Pulau Sumba (Surveilans Berbasis Laboratorium) Analisis Kegiatan Follow up dan Kepatuhan Pengobatan di Kabupaten Sumba Tengah	Dahak	222	Tahap 1 & 2 Kab. Sumba Tengah (Wilker Puskesmas Wairasa dan Puskesmas Malinjak) Tahap 3 Kabupaten Sumba Tengah (Puskesmas Ubbu Riri dan Puskesmas Malinjak) Tahap 4 Kabupaten Sumba Tengah (Puskesmas Mananga) Tahap 5 Kabupaten Sumba Tengah (Puskesmas Lendiwacu)
6	Surveilans HIV (skrining HIV Berbasis Komunitas) di Kabupaten Sumba Timur	Darah	1865	Tahap 1 dan 2
7	Surveilans Leptospirosis	Darah/Serum	536	Tahap 1 Kota Kupang Tahap I,II, dan III di Kabupaten Kupang
8	Surveilans Kewaspadaan Dini Keracunan Makanan	Makanan/Minuman	938	Tahap I dan II Kab. TTS, TTU
9	Surveilans Kolaborasi dengan BBLKL Salatiga Penyakit Zoonis (Hantavirus & Leptospirosis	Serum Darah, Organ Ginjal, dan Paru	46	1 Kali Pengumpulan data

Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebanyak 10.000 spesimen. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, realisasi pemeriksaan spesimen yang dicapai oleh Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang adalah sebesar 25.090 spesimen, atau mencapai 250,9%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pemeriksaan laboratorium pada Tahun 2025 melampaui target secara signifikan. Realisasi ini merupakan akumulasi dari 9 (Sembilan) kegiatan surveilans berbasis laboratorium yang dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota wilayah kerja, meliputi surveilans penyakit menular, zoonosis, serta kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa.

Kegiatan Surveilans Faktor Risiko Penularan Malaria pada daerah status eliminasi dan daerah fokus non-aktif telah melakukan pemeriksaan sebanyak 3.074 spesimen darah sediaan tipis dan tebal. Pengumpulan sampel dilaksanakan secara bertahap di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, serta Kabupaten Sumba Timur, dengan cakupan tahap pengumpulan data mulai dari Tahap I hingga Tahap V di beberapa wilayah. Kegiatan ini mendukung pemantauan keberlanjutan status eliminasi malaria di wilayah sasaran. Selanjutnya, Surveilans Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) telah melakukan pemeriksaan sebanyak 6.792 spesimen multi-sampel, yang dikumpulkan di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahap I dan II serta di Kota Kupang pada Tahap I. Kegiatan ini berperan penting dalam mendukung sistem kewaspadaan dini terhadap potensi kejadian luar biasa di daerah.

Kegiatan Analisis Infeksi Kejadian Kecacangan pada Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur telah melakukan pemeriksaan sebanyak 989 spesimen, dengan pengumpulan data pada Tahap I dan II di Kabupaten Sumba Timur yang melibatkan 30 sekolah dasar serta di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan cakupan 15 sekolah dasar. Kegiatan ini mendukung pemetaan masalah kecacangan pada anak usia sekolah. Pada Surveilans Demam Berdarah Dengue (DBD), realisasi pemeriksaan mencapai 8.931 spesimen darah sediaan/serum yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Capaian ini mencerminkan tingginya kebutuhan pemeriksaan laboratorium dalam mendukung pengendalian DBD di wilayah tersebut.

Kegiatan Surveilans Faktor Risiko Tuberkulosis (TB) berbasis laboratorium di Kabupaten Sumba Tengah telah melakukan pemeriksaan sebanyak 222 spesimen dahak. Pengumpulan sampel dilakukan secara bertahap dari Tahap I hingga Tahap V dengan

melibatkan beberapa wilayah kerja puskesmas, yaitu Puskesmas Wairasa, Malinjak, Ubbu Riri, Mananga, dan Lendiwacu, sebagai bagian dari evaluasi kegiatan tindak lanjut dan kepatuhan pengobatan TB. Sementara itu, Surveilans HIV (skrining HIV berbasis komunitas) di Kabupaten Sumba Timur telah melakukan pemeriksaan sebanyak 1.865 spesimen darah, dengan pengumpulan data pada Tahap I dan II. Kegiatan ini mendukung peningkatan deteksi dini kasus HIV di tingkat komunitas.

Pada Surveilans Leptospirosis, realisasi pemeriksaan mencapai 536 spesimen darah/serum, yang dikumpulkan pada Tahap I di Kota Kupang serta Tahap I hingga III di Kabupaten Kupang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat deteksi dini penyakit zoonotik di wilayah berisiko. Kegiatan Surveilans Kewaspadaan Dini Keracunan Makanan mencatat realisasi sebanyak 938 sampel makanan dan minuman, dengan pengumpulan data pada Tahap I dan II di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kegiatan ini mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kejadian keracunan pangan. Selain itu, Loka Labkesmas Kupang juga melaksanakan Surveilans Kolaborasi dengan BBLKL Salatiga untuk Penyakit Zoonosis (Hantavirus dan Leptospirosis) dengan realisasi 46 spesimen berupa serum darah serta organ ginjal dan paru. Pengumpulan data dilakukan satu kali sebagai bagian dari kegiatan kolaboratif lintas unit kerja.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan surveilans Tahun 2025 menunjukkan peran aktif Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang dalam mendukung sistem surveilans kesehatan masyarakat berbasis laboratorium, baik melalui deteksi dini penyakit, pemantauan faktor risiko, maupun respon terhadap kejadian khusus di wilayah kerja.

1.2 JUMLAH REKOMENDASI HASIL SURVEILANS BERBASIS LABORATORIUM

Gambaran Umum

Pada Tahun 2025 kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan yang bersumber dari hasil surveilans penyakit prioritas telah memasuki tahap akhir dan penyelesaian seluruh rangkaian kegiatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium serta dukungan terhadap pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selama periode pelaporan seluruh tim penanggung jawab kegiatan telah menyelesaikan proses analisis data, finalisasi dokumen, serta penyampaian rekomendasi

kebijakan kepada pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan lokus surveilans. Rekomendasi kebijakan yang telah difinalisasi mencakup topik HIV dan AIDS, kewaspadaan dini keracunan makanan, kewaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), surveilans malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), leptospirosis, kecacingan, dan tuberkulosis (TB). Telah dihasilkan sebanyak 12 dokumen rekomendasi kebijakan, yang disusun berdasarkan 8 kegiatan surveilans Labkesmas Tahun 2025. Beberapa kegiatan surveilans menghasilkan lebih dari satu rekomendasi kebijakan sesuai dengan jumlah lokus wilayah sasaran, sehingga jumlah rekomendasi yang dihasilkan melebihi target Perjanjian Kinerja, yaitu 5 rekomendasi kebijakan.

Seluruh dokumen rekomendasi kebijakan telah disampaikan kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan kepala daerah terkait. Penyampaian dilakukan melalui media elektronik (WhatsApp) sebagai upaya percepatan komunikasi dan distribusi dokumen, serta melalui jasa pos untuk memenuhi ketentuan administrasi dan pengarsipan resmi, mengingat keterbatasan anggaran untuk kegiatan advokasi tatap muka.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana kerja. Tidak terdapat kendala signifikan yang menghambat penyelesaian kegiatan. Seluruh target indikator kinerja rekomendasi kebijakan dapat tercapai dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV ini menjadi dasar penting bagi pemanfaatan rekomendasi kebijakan dalam memperkuat strategi pencegahan dan pengendalian penyakit menular di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan

Tabel 3.4 menyajikan ringkasan rekomendasi kebijakan pada berbagai isu kesehatan prioritas di beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di kabupaten-kabupaten yang menjadi fokus intervensi. Setiap baris dalam tabel mencakup topik kesehatan yang menjadi perhatian, judul rekomendasi kebijakan yang sedang dikembangkan, rincian kegiatan yang telah dilakukan.



Tabel 3.4. Rekomendasi kebijakan hasil surveilans berbasis Laboratorium Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025.

No	Surveilans	Judul RK	Jumlah RK	Tujuan Rekomendasi
		2025	2025	
1	Surveilans HIV (Skrining HIV Berbasis Komunitas)	Penguatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV di Kabupaten Sumba Timur Melalui Pendekatan Berbasis Data Surveilans-	1	1. Bupati Sumba Timur 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur
2	Kewaspadaan dini keracunan makanan	Mitigasi Keracunan Makanan Melalui Pengawasan Labkesmas secara Berjenjang Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur	3	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu
3	Kewaspadaan dini & penanggulangan KLB	1. Krisis Resistensi Insektisida dan Ancaman Kesehatan Masyarakat (TTS dan Kota) 2. Policy Brief : Penguatan Kebijakan Identifikasi Serotipe Virus Dengue (DENV) untuk Respons Kesehatan Masyarakat yang Lebih Efektif (Khusus Belu)	2	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu
4	Surveilans Malaria	Risiko penularan malaria pada daerah status eliminasi dan daerah fokus non aktif	1	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS
5	DBD	Strategi pengendalian DBD di kabupaten sumba Barat Daya dan Kab Sumba Timur.	1	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur
6	Leptospirosis	Peran petugas Laboratorium dalam Diteksi Dini dan upaya		1. Kepala Dinas Kesehatan Kota



		pengendalian Penyakit Leptospirosis-		Kupang 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang
7	Kecacangan	Kecacangan Berbasis Komunitas dan Lintas Sektor di Kabupaten Sumba Timur	2	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU
8	TB	Peran Laboratorium dalam Surveilans TB: Memperkuat Sistem Follow-Up Pasien TB di Kabupaten Sumba Tengah	1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah



Capaian Utama.

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Surveilans Berbasis Laboratorium

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi
1 Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	5	12	240

Rekomendasi kebijakan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pertama yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun berjalan, dengan sebanyak 5 target rekomendasi kebijakan. Pada periode pelaporan, telah dihasilkan sebanyak 12 dokumen rekomendasi kebijakan, sehingga realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan 8 kegiatan surveilans berbasis laboratorium Tahun 2025, di mana beberapa surveilans menghasilkan lebih dari satu rekomendasi kebijakan sesuai dengan jumlah lokus wilayah sasaran yang berbeda. Dengan demikian, penyusunan rekomendasi kebijakan disesuaikan dengan karakteristik permasalahan kesehatan di masing-masing wilayah.

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, capaian indikator kinerja rekomendasi kebijakan dinyatakan tercapai melebihi target (*overachieved*).

1.3 PERSENTASE BIMBINGAN TEKNIS SECARA RUTIN DAN BERJENJANG DI WILAYAH BINAAN OLEH UPT LABKESMAS

Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) kepada Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di wilayah binaan merupakan salah satu fungsi utama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Labkesmas sebagai bagian dari unit pelaksana di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan keseragaman pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat secara berkelanjutan di seluruh wilayah binaan.

Dasar pelaksanaan bimbingan teknis mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/154/2024 tentang Penetapan Wilayah



Binaan Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang menjadi landasan penugasan UPT Labkesmas dalam melaksanakan pembinaan teknis kepada Labkesmas di wilayah binaan, meliputi Laboratorium Puskesmas, Labkesda Kabupaten/Kota, dan Labkesda Provinsi. Penetapan wilayah binaan tersebut tetap digunakan sebagai dasar operasional pembinaan meskipun telah terjadi penyesuaian nomenklatur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Tabel 3.6 Persentase capaian Bimbingan Teknis secara Rutin dan Berjenjang di Wilayah Binaan oleh UPT Labkesmas

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi Kinerja		% Realisasi	
		Tier 3	Tier 2	Tier 3	Tier 2	Tier 3	Tier 2
1	Bimbingan Teknis secara Rutin dan Berjenjang di Wilayah Binaan oleh UPT Labkesmas	2 Labkesmas	7 dari 14 Labkesmas	2	14	100	100

Bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang dilaksanakan oleh UPT Labkesmas kepada wilayah binaan yang terdiri dari Labkesmas Tier 3 dan Tier 2. Tier 3 mencakup 2 (dua) Labkesmas Provinsi, yaitu Labkesmas Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Labkesmas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara itu, Tier 2 terdiri dari 14 Labkesmas Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi NTT dan NTB. Labkesmas Tier 2 yang berada di Provinsi NTT mencakup Labkesmas Sumba Barat Daya, Labkesmas Sumba Barat, Labkesmas Sikka, Labkesmas TTU, Labkesmas Kabupaten Kupang, Labkesmas Kota Kupang, dan Labkesmas Alor. Sementara Labkesmas Tier 2 yang berada di Provinsi NTB mencakup Labkesmas Kota Mataram, Labkesmas Lombok Barat, Labkesmas Lombok Tengah, Labkesmas Bima, Labkesmas Kota Bima, dan Labkesmas Dompu.

Tabel 3.7 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Secara Rutin dan Berjenjang di Wilayah Binaan Loka Labkesmas Kupang

No	Nama Kegiatan/Tema	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi/Sasaran		Metode Kegiatan
			Labkesmas Tier 3	Labkesmas Tier 2	
1	Webinar Bimbingan Teknis Surveilans Vektor Berbasis Laboratorium	30 Juni 2025	Tier 3	Tier 2	Daring
2	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Vektor	10 Juli 2025	Tier 3	Tier 2	Hybrid



No	Nama Kegiatan/Tema	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi/Sasaran		Metode Kegiatan
			Labkesmas Tier 3	Labkesmas Tier 2	
	Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Kalibrasi Provinsi NTB				
3	Advokasi Penyelenggaraan Labkesmas Kab. TTU, Tahun 2025 dengan materi “Kebijakan dan Standard Pelayanan Labkesmas”	18 Juni 2025		Tier 2	Hybrid
4	Konsolidasi dan Koordinasi Labkesmas Tingkat Regional 6. “Persiapan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Untuk Pengujian Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan	23-25 Juni 2025	Tier 3 (NTT dan NTB)	Tier 2 NTT: Labkesmas Kota Kupang, Kab.Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Barat) NTB: Labkesmas Lombok Barat, Labkesmas Kota Mataram, Lombok Tengah dan Kota Bima	Hybrid
5	Bimtek Pemeriksaan vector di Labkesmas Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Lombok Barat, Kota Mataram dan Labkesmas Prov.NTB	8-10 Juli 2025		Tier 2	Hybrid
6	Bimtek Pemeriksaan Vektor Labkesmas Kab. Ende, Prov NTT	28-30 Agustus 2025		Tier 2	Hybrid

Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) di wilayah binaan Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang sepanjang Tahun 2025 telah dilaksanakan secara rutin, terencana, dan berjenjang sesuai dengan tingkatan Labkesmas. Kegiatan diawali dengan



perencanaan dan koordinasi program surveilans pada Triwulan I sebagai landasan pelaksanaan penguatan kapasitas teknis di tingkat regional dan kabupaten/kota.

Pada Labkesmas Tingkat 2, bimbingan teknis dan advokasi dilaksanakan secara lebih intensif dan aplikatif melalui beberapa kegiatan utama, meliputi bimbingan teknis surveilans berbasis laboratorium, advokasi kebijakan dan standar pelayanan Labkesmas Kabupaten TTU, bimbingan teknis persiapan laboratorium untuk pengujian vektor dan binatang pembawa penyakit, bimbingan teknis pemeriksaan vektor di berbagai Labkesmas kabupaten/kota, bimbingan teknis pemeriksaan vektor di Labkesmas Kabupaten Ende Provinsi NTT, serta kegiatan alih pengetahuan melalui bimbingan teknis Loka Labkesmas Kupang ke Laboratorium Kesehatan Daerah. Pola pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya pendampingan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga memperkuat aspek kebijakan dan tata kelola Labkesmas Tingkat 2.

Sementara itu, pada Labkesmas Tingkat 3, bimbingan teknis difokuskan pada penguatan peran dan fungsi laboratorium rujukan, khususnya dalam pelaksanaan surveilans berbasis laboratorium dan surveilans vektor. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup bimbingan teknis surveilans berbasis laboratorium, persiapan laboratorium untuk pengujian vektor dan binatang pembawa penyakit, bimbingan teknis surveilans vektor berbasis laboratorium, serta bimbingan teknis pemeriksaan vektor yang dilaksanakan secara regional. Pelaksanaan kegiatan tersebut mendorong keseragaman standar teknis serta peningkatan kualitas layanan surveilans antar jejaring Labkesmas Tingkat 3.

Secara keseluruhan, pelaksanaan IKK “Pelaksanaan Bimbingan Teknis Secara Rutin dan Berjenjang” Tahun 2025 dapat disimpulkan telah tercapai secara optimal, ditandai dengan pelaksanaan bimbingan teknis yang berkesinambungan sepanjang Tahun, menggunakan metode daring, luring, dan hybrid, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan peran masing-masing tingkatan Labkesmas. Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas layanan surveilans berbasis laboratorium di wilayah binaan Loka Labkesmas Kupang.



1.4 JUMLAH MOU/PKS/FORUM KERJASAMA ATAU FORUM KOORDINASI DENGAN JEJARING. LEMBAGA/INSTITUSI NASIONAL DAN/ATAU INTERNASIONAL

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) serta meningkatkan mutu layanan pemeriksaan dan pengujian, penguatan jejaring dan kerja sama menjadi salah satu strategi utama yang dilaksanakan oleh satuan kerja. Jejaring dimaknai sebagai sistem kerja sama atau keterkaitan Labkesmas dengan laboratorium lain serta lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi laboratorium kesehatan masyarakat.

Kerja sama yang dilaksanakan mencakup seluruh kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh Labkesmas dengan jejaring dan/atau institusi nasional dan internasional, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta partisipasi aktif dalam forum kerja sama atau forum koordinasi lintas sektor dan lintas program.

MoU, PKS, forum kerja sama, dan forum koordinasi yang dibangun diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Labkesmas, antara lain dalam penyelenggaraan layanan pemeriksaan dan pengujian laboratorium, kegiatan magang atau praktik kerja lapangan, penelitian dan pengembangan, penyediaan fasilitator atau narasumber, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Kerja sama ini juga berfungsi sebagai sarana koordinasi, pertukaran informasi, dan harmonisasi kebijakan dalam rangka memperkuat sistem laboratorium kesehatan masyarakat.

Tahun 2025, Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang telah melaksanakan berbagai kegiatan jejaring dan kerja sama dengan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta institusi terkait lainnya. Adapun kegiatan jejaring dan kerja sama yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:



Tabel 3.8 Kegiatan jejaring dan Kerja sama yang telah di laksanakan oleh Loka Labkesmas Kupang

Kegiatan Jejaring	Judul	No.Surat	Instansi
Perjanjian Kerja Sama	1. Kersama dalam pelaksanaan webinar surveilans vector berbasis Laboratorium	Tanpa surat tugas	Loka Labkesmas Kupang
	2. Fasilitator kegiatan advokasi Labkesmas di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)	Nomor: HK.03.01/B.XI.10/835/2025 Nomor: 400.7/24/Dinkes	Kabupaten TTU
	3. Fasilitator kegiatan penanggulangan peningkatan KLB/wabah di Kabupaten Sumba Barat.	TL.01.03/B.XII.3/690/2025	Kabupaten Sumba Barat
	4. Narasumber pada kegiatan koordinasi Labkesmas Regional VI.	TL.03/B.XII.3/1104/2025	BBKLM Surabaya
	5. Fasilitator Pelatihan Entomologi Malaria bagi Petugas Program Malaria Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD)	TL.01.03/B.XII.3/671/2025	Kabupaten Sumba Barat Daya
	6. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Kupang.	Nomor: HK.03.01/B.XI.10/683/2025 Nomor: 443/884/P2P/VIII/2025	Kabupaten Kupang
	7. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).	Nomor: TI.01.03/B.XII.3/824/2025	Kabupaten Timor Tengah Utara
	8. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan RSUP Ben Mboi Kupang.	Nomor: HK.03.01/B.XI.10/1005/2005 Nomor: HK.03.01/D.XXIX/2477/2025	RSUP Ben Mboi Kupang
	9. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Belu.	Nomor: HK.03.01/B.XI.3/1030/2025	Kabupaten Belu



Kegiatan Jejaring	Judul	No.Surat	Instansi
		Nomor: 879/894.7/Kes/X/2025	
	10. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).	Nomor: HK.03.01/B.XII.3/1037/2025 Nomor: 440.01/1706/53.18/X/2025	Kabupaten Sumba Barat Daya
	11. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.	Nomor: HK.03.01/B.XII.3/1048/2025 Nomor: 045/71/DIKES/XI/2025	Kabupaten Lombok Barat
	12. Fasilitator Pelatihan Surveilans bagi Tenaga Entomolog Puskesmas se-Kabupaten Sikka.	Nomor: PL.02.01/B.XII.3/1177/2025	Kabupaten Sikka

Melalui pelaksanaan kegiatan jejaring dan kerja sama tersebut, satuan kerja berkontribusi aktif dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi lintas wilayah, serta optimalisasi peran Labkesmas dalam mendukung surveilans dan pengendalian penyakit berbasis laboratorium.



Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Indikator Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan Jejaring, Lembaga/Institusi Nasional dan/atau Internasional

IKK	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kesimpulan
5	12	240%	Target Terpenuhi

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) jumlah MoU/PKS/Forum Kerja Sama atau Forum Koordinasi Satker pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebanyak 5 kegiatan. Hingga akhir Tahun 2025, realisasi capaian indikator tersebut mencapai 12 kegiatan. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, capaian kinerja IKK mencapai 240%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja telah terpenuhi dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan komitmen dan upaya aktif satuan kerja dalam memperkuat jejaring dan kemitraan strategis guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Labkesmas, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan pemeriksaan dan pengujian, penguatan surveilans berbasis laboratorium, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Keberhasilan pencapaian indikator ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Labkesmas serta memperkuat peran satuan kerja dalam mendukung program kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan Kualitas Fasilitas dan Mutu Labkesmas

Adapun uraian target dan realisasi IKK pada Sasaran Kegiatan 2 sebagai berikut:

Tabel 3.10 Uraian target dan realisasi Meningkatkan Kualitas Fasilitas dan Mutu Labkesmas Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Capaian		Satuan
		Target		2024	2025	
		2024	2025			
1	Mengikuti dan Lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 Kali	2 Kali	2 kali (100%)	3 Kali (150%)	Kali
2	Labkesmas Memiliki Standar Minimal Sistem Pengelolaan Biorepositori	100%	100%	100%	100%	Persen



2.1 MENGIKUTI DAN LULUS PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME)

Pemantapan Mutu Eksternal (PME) merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa laboratorium kesehatan masyarakat menyediakan hasil yang akurat, dapat diandalkan dan berkualitas tinggi. Kualitas hasil pemeriksaan yang bermutu, sangat diperlukan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mengacu pada permenkes 43 Tahun 2013.tentang Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2013 tentang tata cara penyelenggaraan Laboratorium klinik yang baik. Setiap Laboratorium kesehatan wajib mengikuti pemantapan Mutu Eksternal yang diselenggarakan oleh pemerintah secara teratur dan periodik meliputi semua bidang pemeriksaan laboratorium.

Loka Labkesmas Kupang berkomitmen menjaga mutu hasil pemeriksaan laboratorium melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara PME atau pada instansi penyelenggara yang sudah terakreditasi dan atau instansi laboratorium lainnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari jaminan mutu eksternal untuk mengevaluasi konsistensi dan ketepatan hasil uji laboratorium secara berkala. Berikut adalah beberapa aspek penting dari Pemantapan Mutu Eksternal.

Pelaksanaan PME Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025 adalah Pemantapan Mutu Eksternal – Uji Profisiensi (PME-UP) dan Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PNPME) Mikroskopis Malaria Siklus I. PME-UP Identifikasi Nyamuk telah selesai dilaksanakan pada Triwulan I. PME-UP merupakan salah satu penjaminan mutu pemeriksaan laboratorium. Penyelenggaraan PME-UP mengacu pada SNI ISO/IEC 17043:2023. Kegiatan PME-UP Identifikasi Nyamuk dilaksanakan berdasarkan undangan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Nomor YM.01.03/IX.1/3810/2024, tertanggal 23 Desember 2024. Kegiatan PME-UP Identifikasi Nyamuk dilakukan dengan metode mikroskopis.



Tabel 3.11 Realisasi Kinerja Indikator Mengikuti dan Lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)

Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja			Rincian PME Tahun 2025
		Target 2025	Realisasi Realisasi Tahun 2025	% Realisasi	
1	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2	2	100	Uji Profisiensi Identifikasi Nyamuk – Lulus Pemantapan Mutu Eksternal bidang mikrobiologi siklus 1 Tahun 2025 (Parameter Mikroskopis Malaria) Pemantapan Mutu Eksternal bidang mikrobiologi siklus 2 Tahun 2025 (Parameter Mikroskopis Malaria)

Berdasarkan tabel Pemantapan Mutu Eksternal (PME), indikator Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebanyak 2 kegiatan. Berdasarkan hasil pelaksanaan, Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pada seluruh kegiatan PME yang ditargetkan, dengan realisasi sebanyak 2 kegiatan atau capaian 100%.

Kegiatan PME yang diikuti meliputi Uji Profisiensi Identifikasi Nyamuk serta Pemantapan Mutu Eksternal bidang mikrobiologi untuk parameter Mikroskopis Malaria, yang dilaksanakan pada siklus 1 dan siklus 2 Tahun 2025. Keikutsertaan dan kelulusan pada seluruh kegiatan PME tersebut menunjukkan bahwa kompetensi teknis, ketepatan metode pemeriksaan, serta penerapan sistem mutu laboratorium telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.



Gambar 3.1 Bukti keikutsertaan dan lulus PME – Uji Profisiensi Identifikasi Nyamuk

PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL-UJI PROFISIENSI IDENTIFIKASI NYAMUK

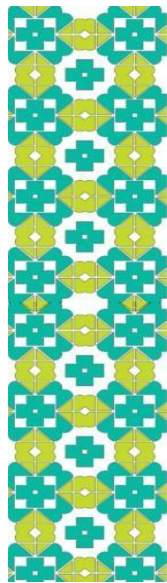
DISELENGGARAKAN OLEH:
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

Nama Laboratorium : Loka Labkesmas Waikabubak
Alamat : Jalan H.R. Koroh, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

KODE	SPESES	HASIL IDENTIFIKASI PESERTA	KESESUAIAN
BBLKL029	<i>Anopheles maculatus</i>	<i>Anopheles maculatus</i>	Sesuai
BBLKL030	<i>Anopheles maculatus</i>	<i>Anopheles maculatus</i>	Sesuai
BBLKL031	<i>Armigeres kesseli</i>	<i>Armigeres subalbatus</i>	Tidak Sesuai
BBLKL032	<i>Armigeres kesseli</i>	<i>Armigeres subalbatus</i>	Tidak Sesuai
BBLKL033	<i>Aedes albopictus</i>	<i>Aedes albopictus</i>	Sesuai
BBLKL034	<i>Aedes albopictus</i>	<i>Aedes albopictus</i>	Sesuai
BBLKL035	<i>Anopheles aconitus</i>	<i>Anopheles aconitus</i>	Sesuai
BBLKL036	<i>Anopheles aconitus</i>	<i>Anopheles aconitus</i>	Sesuai
BBLKL037	<i>Aedes aegypti</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Sesuai
BBLKL038	<i>Aedes aegypti</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Sesuai
BBLKL039	<i>Culex quinquefasciatus</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Sesuai
BBLKL040	<i>Culex quinquefasciatus</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Sesuai
BBLKL041	<i>Anopheles sinensis</i>	<i>Anopheles sinensis</i>	Sesuai
BBLKL042	<i>Anopheles sinensis</i>	<i>Anopheles sinensis</i>	Sesuai

Keterangan ini menyatakan bahwa laboratorium tersebut di atas telah melakukan Uji Profisiensi Pemantapan Mutu Eksternal Identifikasi Nyamuk yang diselenggarakan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

Gambar 3.2. Hasil Evaluasi Identifikasi Nyamuk pada PME – Uji Profisiensi Identifikasi Nyamuk



SERTIFIKAT

Nomor : YM.01.03/IX.1/407/2025

Diberikan Kepada:

Loka Labkesmas Waikabubak

Atas partisipasinya pada

PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL - UJI PROFISIENSI IDENTIFIKASI NYAMUK

dengan Kategori : **LULUS**

Salatiga, 14 Februari 2025

Kepala,

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Akhmad Saikhu, SKM, M.Sc.PH
NIP 196805251992031004



Dokumen ini telah di tanda tangani secara elektronik

Gambar 3.3 Bukti keikutsertaan dan lulus PME –Pemantapan Mutu Eksternal bidang mikrobiologi siklus 1 Tahun 2025 (Parameter Mikroskopis Malaria)



Gambar 3.4 Bukti keikutsertaan dan lulus PME –Pemantapan Mutu Eksternal bidang mikrobiologi siklus 2 Tahun 2025 (Parameter Mikroskopis Malaria)



Pelaksanaan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) pada Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang selama periode pelaporan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara teknis, tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh tahapan PME dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Namun demikian, dari aspek non-teknis masih terdapat tantangan, khususnya terkait belum tersusunnya pemetaan dan penjadwalan kegiatan PME secara berkala di Loka Labkesmas Kupang. Kondisi ini menjadi perhatian untuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan kegiatan PME secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai upaya tindak lanjut, telah dilakukan penyusunan sarana pendukung berupa tautan (link) usulan kegiatan PME yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengajuan pelaksanaan PME pada periode selanjutnya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan kegiatan PME, memastikan keteraturan jadwal pelaksanaan, serta mendukung peningkatan mutu laboratorium secara berkesinambungan.

Dengan adanya perbaikan pada aspek perencanaan non-teknis tersebut, pelaksanaan Pemantapan Mutu Eksternal ke depan diharapkan dapat berjalan lebih optimal, terstruktur, dan konsisten dalam mendukung penerapan sistem mutu laboratorium di Loka Labkesmas Kupang.

2.2 LABKESMAS MEMILIKI STANDAR MINIMAL SISTEM PENGELOLAAN BIOREPOSITORI

Biorepository merupakan fasilitas dan metode penyimpanan materi biologi beserta data identitas dan informasinya dalam waktu yang lama (lebih dari 1 Tahun). Materi biologi digunakan untuk uji konfirmasi; control positif, pembandingan varian atau subtype tertentu hasil mutasi; pembuatan standar baku; dan mendukung kegiatan kajian serta riset. Penyelenggaraan biorepository bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, dampak keamanan dan keselamatan masyarakat serta bioterrorism lainnya. Penyelenggaraan biorepository memperhatikan tingkat resiko dan menerapkan biosafety dan biosecurity.

Adapun standar minimal pengelolaan sistem biorepository mencakup :

a. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan ruangan tempat khusus, akses terbatas, CCTV, kapasitas Revco penyimpanan.



- b. SDM : kualifikasi SDM lengkap sesuai dengan standar, sudah mendapat pelatihan Biorepository.
- c. Spesimen dan / atau sampel : jumlah spesimen dan / atau sampel yang terhubung dengan informasi identitas dan asal spesimen dan / atau sampel sebanyak minimal 1000 spesimen dan/atau sampel (baik secara manual maupun elektronik)
- d. SOP : tersedia SOP pengelolaan biorepository

Tabel 3.12 capaian pengelolaan sistem biorepository di Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang Tahun 2025.

No	Standar	Capaian	Catatan
1	Sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none">➤ Tersedia ruangan khusus,➤ Tersedia CCTV➤ Tersedia unit Freezer -80➤ Akses terbatas	Tercapai
2	SDM	4 Orang mendapat pelatihan bersertifikat.	Pelatihan Tahun 2025
3	Spesimen dan atau / sampel	1.016	Tercapai
4	SOP	Tersedia SOP	Telah ada SOP Pengolahan sampel

Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang pada Tahun 2025 memiliki standar minimal Pengelolaan sistem biorepository sebesar **100%**

1. Sarana dan Prasarana

Ruangan Biorepository di Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang telah dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan sampel berupa rak penyimpanan dan juga lemari pendingin/ deep freeze. Ruangannya telah dilengkapi dengan CCTV yang dapat dipantau secara riil time melalui mobil android dan akses terbatas.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pengelolaan biorepository saat ini sudah terdapat 4 (empat) orang yang telah mengikuti pelatihan biorepository dan telah memiliki sertifikat.

3. Spesimen atau sampel Tahun 2025



Tabel 3.13 Sampel/Spesimen yang tersimpan di biorepository Loka Labkesmas Kupang
Tahun 2025

No	Jenis Sampel	Jumlah Sampel Hewan	Satuan	Keterangan
1	Hewan	7	Vial	Awetan basah ginjal tikus
2	Hewan	3	Vial	Awetan basah ektoparasit
3	Hewan	2	Ekor	Awetan basah tikus
4	Hewan	21	Vial	Awetan basah ginjal tikus
5	Hewan	2	Vial	Awetan basah ektoparasit (pinjal 87 ekor)
6	Hewan	1	Vial	Awetan basah ektoparasit (mites 94 ekor)
7	Hewan	2	Vial	Awetan basah ektoparasit (tick 3 ekor)
8	Hewan	63	Vial	Awetan basah ginjal tikus
9	Hewan	1	Vial	Awetan basah ektoparasit (pinjal 40 ekor)
10	Hewan	1	Vial	Awetan basah ektoparasit (mites 112 ekor)
11	Hewan	1	Vial	Awetan basah ektoparasit (tick 4 ekor)
12	Hewan	10	Vial	Awetan basah ginjal tikus
13	Hewan	1	Vial	Awetan basah ektoparasit
14	Hewan	61	Ekor	Preparat Nyamuk Dalam Kondisi Baik
15	Hewan	2	Ekor	Awetan basah tikus, R. norvegikus, baik
16	Hewan	1	Ekor	Awetan basah tikus, Mus musculus, baik
17	Hewan	1	Ekor	Awetan basah tikus, R. tanezumi, baik
18	Hewan	1	Ekor	Awetan basah tikus, R. tanezumi (R. santalum), baik
19	Hewan	82	Ekor	Pinning Nyamuk, Baik
20	Hewan	24	Vial	Awetan basah ginjal tikus
21	Hewan	3	Vial	Awetan basah pinjal
22	Hewan	3	Vial	Awetan basah tick
23	Hewan	3	Vial	Awetan basah mites
24	Manusia	200	preparat	Slide darah malaria (21 positif)
25	Manusia	5	vial	Serum darah reaktif HIV
26	Hewan	10	Ekor	Awetan basah tikus
27	Hewan	9	Vial	Awetan basah ektoparasi
28	Hewan	183	Vial	DNA Tikus(positif 30)
29	Hewan	150	Ekor	Pinning Nyamuk, Baik
30	Hewan	63	Vial	DAN Nyamuk
31	Manusia	100	Vial	DNA darah manusia
Jumlah Sampel		1016		

Berdasarkan perjanjian kenerja Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang dengan Sekretariat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas tanggal 31 Januari 2025, target Labkesmas Memiliki Standar Minimal Sistem Pengelolaan Biorepositori



sebesar 100%.

3. Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Adapun uraian target dan realisasi IKK pada Sasaran Kegiatan 3 sebagai berikut:

Tabel 3.14 Capaian IKK Pada Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
		Target 2024	Capaian Tahun 2024	Target 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi
1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas			77 (Nilai)	87,5	113,6
2	Nilai Kinerja Anggaran	80,1 (Nilai)	98,29	92,35 (Nilai)	96,74	104,7
3	Indeks Kualitas SDM Labkesmas			81 (Nilai)	81,17	100,2
4	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)			3,95 (Nilai)	3,60	91,13
5	Persentase Realisasi Anggaran Labkesmas	96%	88,65	96%	86,84%	90,45
6	Kinerja Implementasi WBK Satker	75 Skala	45,09	75 Skala	39,81	53,08
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	96,43	80%	95%	118,75
8	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas	95%	88,65	95%	88,65%	93,32

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik jika dibandingkan dengan Tahun 2024. Sebagian indikator utama mengalami peningkatan capaian dan mampu melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada aspek kepuasan pengguna layanan, kinerja anggaran, serta peningkatan kompetensi ASN. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas layanan, efektivitas pengelolaan sumber daya, dan penguatan kapasitas organisasi.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang capaian Tahun 2025 berada di bawah target maupun menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun sebelumnya, terutama pada aspek realisasi anggaran, implementasi WBK satker, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Kondisi ini menjadi area perhatian untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya.



Perlu disampaikan bahwa terdapat 3 indikator yang belum tersedia pada Tahun 2024, yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas, Indeks Kualitas SDM Labkesmas, dan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT), sehingga belum dapat dilakukan perbandingan langsung antara realisasi Tahun 2024 dan 2025. Ketiga indikator tersebut merupakan indikator baru yang ditetapkan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap Renstra terbaru periode 2025–2029. Dengan demikian, analisis tren kinerja untuk indikator dimaksud baru dapat dilakukan setelah tersedia data pembanding pada Tahun pengukuran berikutnya.

3.1 INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN LABKESMAS

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Loka Labkesmas Kupang pada Tahun 2025, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87,5. Survei ini dilaksanakan pada 2 (dua) periode yakni semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) dengan jumlah responden sebanyak 79 orang.


Komposisi responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (54 orang) dan laki-laki sebanyak 25 orang, dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi, yaitu tamat SD (8 orang), SMP (12 orang), SMA (20 orang), dan S1 (39 orang). Variasi karakteristik responden tersebut memberikan gambaran yang cukup representatif terhadap persepsi pengguna layanan laboratorium kesehatan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, nilai IKM 87,5 berada pada kategori mutu pelayanan “B” dengan kinerja pelayanan “Baik”, yang berada dalam rentang nilai 76,61–88,30. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai pelayanan yang diberikan oleh Loka Labkesmas Kupang telah berjalan dengan baik dan memenuhi harapan pengguna layanan.



NRR per Unsur	3,56	3,56	3,64	3,64	3,78	3,58	3,72	3,64	3,72	Nilai Indeks
NRR Tertimbang per Unsur	0,39	0,39	0,40	0,40	0,42	0,40	0,41	0,40	0,41	3,64
IKM Unit Pelayanan										91,11

Gambar 3.5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Loka Labkesmas Kupang Semester 1 Tahun 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Loka Labkesmas Kupang Kementerian Kesehatan RI	
Nilai IKM 	Nama Layanan : Layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat RESPONDEN Jumlah : 40 orang Jenis Kelamin : Laki-laki 11 Orang/ Perempuan 29 orang Pendidikan : Tamat SD : 8 Tamat SMP : 12 Tamat SMA : 11 Tamat S1 : 9 Periode Survei : Oktober s/d Desember 2025

Gambar 3.6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Loka Labkesmas Kupang Semester 2 Tahun 2025

Dengan demikian, hasil SKM Tahun 2025 menjadi dasar penting bagi Loka Labkesmas Kupang untuk melakukan evaluasi internal, memperkuat aspek pelayanan yang dinilai masih kurang optimal, serta mempertahankan unsur-unsur pelayanan yang telah dinilai baik oleh masyarakat, guna mendorong peningkatan mutu pelayanan pada periode berikutnya sesuai dengan prinsip *continuous quality improvement* sebagaimana diamanatkan dalam PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017.

3.2 NILAI KINERJA ANGGARAN LABKESMAS

Nilai kinerja anggaran adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan dan digunakan oleh suatu organisasi, khususnya instansi pemerintah, mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan tingkat pencapaian hasil dari penggunaan dana publik.



Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan nilai kinerja anggaran:

1. Efektivitas:

- Mengukur sejauh mana penggunaan anggaran telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- Efektivitas dinilai berdasarkan hasil akhir atau output yang dihasilkan dari penggunaan anggaran, seperti jumlah proyek yang diselesaikan, layanan yang diberikan, atau tujuan program yang tercapai.

2. Efisiensi:

- Menilai sejauh mana anggaran digunakan secara optimal dengan meminimalkan pemborosan dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu.
- Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh, misalnya biaya per unit output atau rasio antara input dan output.

3. Kepatuhan Anggaran:

- Mengevaluasi apakah penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.
- Kepatuhan ini mencakup aspek-aspek seperti ketepatan waktu dalam pengeluaran, alokasi yang sesuai dengan pos anggaran, dan kepatuhan terhadap peraturan pengadaan.

4. Transparansi dan Akuntabilitas:

- Menilai sejauh mana informasi tentang penggunaan anggaran disampaikan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau pemangku kepentingan lainnya
- Ini mencakup pembuatan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta penyediaan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh publik.

5. Pencapaian Target:

- Mengukur tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana anggaran.
- Ini bisa mencakup berbagai indikator kinerja, seperti target fisik (misalnya jumlah infrastruktur yang dibangun), target keuangan (misalnya realisasi pendapatan dan pengeluaran), dan target layanan (misalnya jumlah penerima manfaat program).



6. Realisasi Anggaran:

- Menilai sejauh mana anggaran yang telah disetujui dan dialokasikan benar-benar digunakan atau direalisasikan.
- Realisasi anggaran sering diukur sebagai persentase dari total anggaran yang telah dibelanjakan dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui.

7. Analisis Varians:

- Melibatkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi aktual untuk mengidentifikasi perbedaan atau varians.
- Analisis ini membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di masa mendatang.

Capaian realisasi anggaran Loka Labkesmas Kupang pada Semester I Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja masih belum optimal jika dibandingkan dengan perencanaan awal. Berdasarkan data dari aplikasi SPAN, dari total pagu efektif sebesar Rp 7.959.886.000, realisasi hingga Semester I tercatat sebesar Rp 3.814.308.238 atau 47,92%, sehingga masih terdapat sisa anggaran yang cukup signifikan. Jika dibandingkan dengan target Semester I, capaian tersebut belum mencapai 50%, yang menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada semester berikutnya. Sementara itu, apabila dilihat dari pagu total termasuk blokir sebesar Rp 10.175.341.000, realisasi hingga Juni 2025 baru mencapai Rp 3.240.272.558 atau 31,84%, yang mengindikasikan masih terdapat anggaran yang belum dapat dimanfaatkan akibat status blokir.

Kondisi tersebut tercermin pada nilai Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Semester I Tahun 2025 yang mencapai 49,64 dengan kategori **Cukup**, yang menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pada Semester II dilakukan berbagai upaya percepatan realisasi anggaran, antara lain melalui percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa, serta penguatan koordinasi antar unit kerja agar seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

The screenshot shows a web interface for monitoring budget performance. The title is 'Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja'. The table below shows the following data:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	004.03.00002	LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAKABUBAK	96,07	97,41	96,74

Additional interface elements include a search bar, a 'Download Excel' button, and navigation controls like 'Sebelumnya' and 'Selanjutnya'.

Gambar 3.7 Nilai Kinerja Anggaran Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025

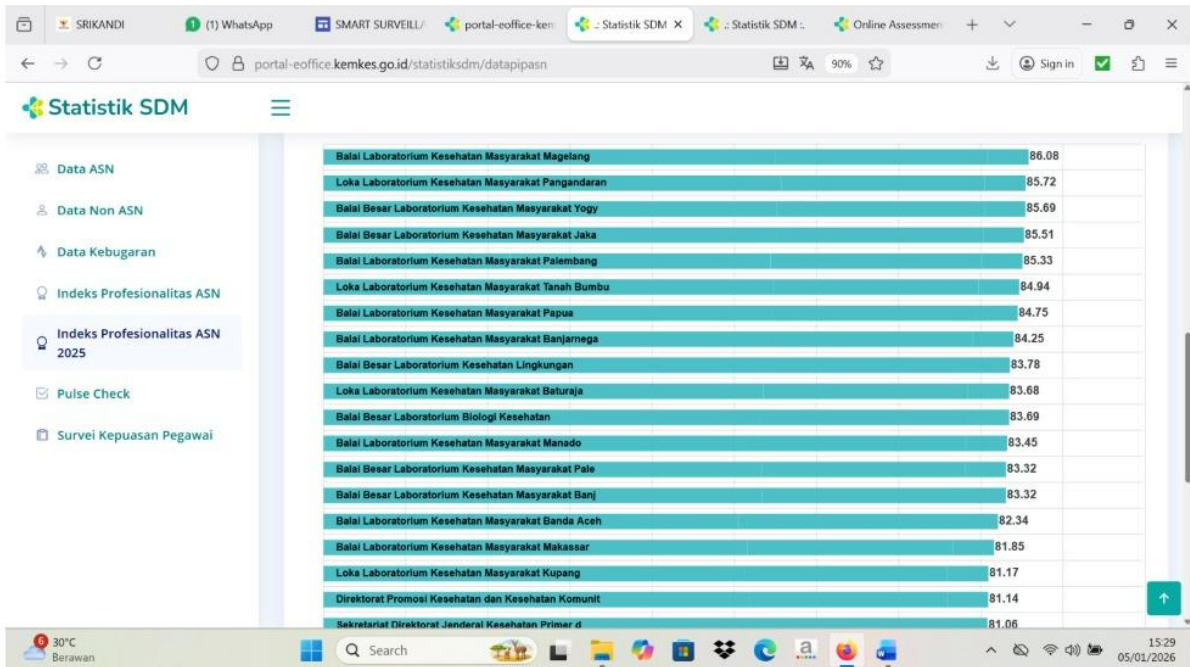
Memasuki Semester II (Juli–Desember 2025), pelaksanaan anggaran menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan data dari aplikasi SPAN, realisasi anggaran hingga Desember 2025 mencapai Rp 7.659.398.178 atau 75,27% dari total pagu. Jika mengacu pada pagu efektif setelah penyesuaian kebijakan efisiensi belanja, capaian tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Peningkatan kinerja ini merupakan hasil dari komitmen seluruh unit kerja dalam mempercepat realisasi, menyelesaikan proses administrasi dan pengadaan, serta memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal.

Kinerja pengelolaan anggaran yang semakin optimal ini tercermin pada capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2025 yang mencapai 96,74, melampaui target yang ditetapkan sebesar 80,1 dan masuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan telah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025 telah mengalami perbaikan yang signifikan dari Semester I ke Semester II dan berhasil mencapai kinerja yang sangat baik pada akhir Tahun anggaran.

3.3 INDEKS KUALITAS SDM LABKESMAS

Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang pada periode penilaian menunjukkan nilai sebesar **81,17**, yang berada pada **kategori Baik**. Capaian ini menggambarkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia telah dilaksanakan secara cukup optimal, khususnya pada aspek

kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin aparatur. Hasil tersebut mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam mendorong profesionalisme ASN melalui pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi serta pelaksanaan tugas dan fungsi secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 3.8 Indeks Profesionalitas ASN Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi capaian Indeks Profesionalitas ASN, antara lain belum meratanya pemenuhan pengembangan kompetensi minimal bagi seluruh ASN, keterbatasan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan secara terstruktur, serta beban kerja yang cukup tinggi sehingga berdampak pada optimalisasi kinerja individu. Selain itu, pemutakhiran data pendukung Indeks Profesionalitas ASN belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten dan tepat waktu.

Sebagai upaya peningkatan capaian pada periode berikutnya, Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang akan melakukan optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN secara lebih terarah dan berkelanjutan, baik melalui pelatihan terstruktur maupun pembelajaran mandiri. Selain itu, akan dilakukan penguatan monitoring dan evaluasi kinerja ASN secara berkala, peningkatan disiplin dan kepatuhan terhadap ketentuan kepegawaian, serta pemutakhiran data Indeks Profesionalitas ASN secara rutin dan akurat. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalitas ASN dan mendukung



pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

3.4 NILAI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI (SPIPT)

Berdasarkan penyelenggaraan SPIPT pada Loka Labkesmas Kupang, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 4.16 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level Terkelola dan Terukur.
2. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3.70 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level Risk Define.
3. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2.96.
4. Nilai Maturitas SPIP-T adalah sebesar 3.60 dengan kategori Terdefinisi

Tabel 3.15 Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Loka Labkesmas Kupang

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Penjaminan Kualitas	Naik/Turun
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4.45	4.16	Turun
2	Manajemen Risiko (MRI)	4.10	3.70	Turun
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	4.17	2.96	Turun
Nilai Maturitas SPIP-T		4.24	3.60	Turun

Hasil penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi, nilai Penilaian Mandiri sebesar 4,24 mengalami penurunan menjadi 3,60 pada hasil Penjaminan Kualitas. Penurunan nilai tersebut terjadi pada seluruh fokus penilaian, yaitu Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kebijakan dan kerangka pengendalian internal telah tersedia dan diterapkan, namun pada tahap penjaminan kualitas masih terdapat kesenjangan antara penilaian mandiri dengan bukti objektif pelaksanaan di lapangan. Maturitas SPIP Terintegrasi pada level 3,60 menempatkan organisasi pada kategori "Terdefinisi", yang mengindikasikan bahwa penerapan pengendalian internal, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi belum sepenuhnya dikelola dan diukur secara konsisten. Sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian tersebut, organisasi telah dan



akan melakukan penguatan sosialisasi kebijakan integritas dan nilai etika yang disertai evaluasi berkala dan tindak lanjut hasil evaluasi, menyelenggarakan pembelajaran anti korupsi secara terencana dan terstruktur baik secara internal maupun eksternal, mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional dan strategis, serta meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh pegawai terkait manajemen risiko melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dievaluasi secara berkala. Tindak lanjut tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsistensi implementasi, memperkuat pembuktian pelaksanaan, serta mendorong peningkatan maturitas SPIP Terintegrasi menuju kategori “Terkelola dan Terukur”.

3.5 PERSENTASE REALISASI ANGGARAN

Persentase realisasi anggaran adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar anggaran yang telah direalisasikan atau digunakan dibandingkan dengan total anggaran yang telah direncanakan atau disetujui dalam suatu periode tertentu. Persentase ini memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian dalam pelaksanaan anggaran, yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu organisasi, terutama dalam konteks instansi pemerintah atau organisasi nirlaba. Selama Tahun 2025 Loka Labkesmas Kupang melaksanakan efisiensi dan proses revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan kewenangan mulai dari revisi POK, KPA, Kanwil DJPB hingga revisi kewenangan DJA. Pada Semester I Tahun 2025, Loka Labkesmas Kupang memperoleh alokasi anggaran berdasarkan DIPA No. SP DIPA- 024.03.2.690802/2025 sebesar Rp. 10.175.341.000,- yang mencakup pagu blokir. Berdasarkan data dari aplikasi SPAN, realisasi anggaran hingga Desember 2025 sebesar Rp. 7.659.398.178,- atau 75,27% dari total pagu. Namun, jika merujuk pada nilai pagu efektif sebesar Rp. 8.844.827.000,- (setelah memperhitungkan kebijakan efisiensi belanja berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025) realisasi mencapai Rp. 7.681.235.133,- atau 86,84% dari total pagu. Apabila mengacu pada pagu efektif setelah penyesuaian kebijakan efisiensi belanja, capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, meskipun masih terdapat selisih anggaran yang belum dapat direalisasikan secara penuh.



Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran masih menghadapi beberapa kendala. Pertama realisasi belanja barang hingga periode pelaporan masih berada di bawah standar yang ditetapkan. Rendahnya realisasi belanja barang disebabkan oleh kebijakan pembatasan pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan swakelola sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-666/MK.03/2025 tentang Langkah Strategis Belanja Kementerian pada Akhir Tahun 2025. Selain itu, rendahnya capaian realisasi juga dipengaruhi oleh masih adanya anggaran terblokir sebesar Rp1,3 miliar yang masih melekat dalam pagu anggaran. Sementara itu, realisasi belanja perjalanan dinas belum optimal akibat penerapan efisiensi anggaran sebesar 50% pada beberapa kegiatan, yang menyebabkan alokasi anggaran tidak mencukupi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, khususnya kegiatan yang memerlukan perjalanan dinas ke luar daerah. Kediam yang kedua Realisasi belanja pegawai belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya mutasi keluar sebanyak 3 (tiga) orang pegawai pada triwulan 1 sehingga terjadi penyesuaian kebutuhan belanja pegawai yang berdampak pada tingkat penyerapan anggaran.

Capaian realisasi anggaran yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan kegiatan selama satu Tahun anggaran berjalan. Hasil ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penetapan pagu, serta kesiapan kegiatan pada Tahun anggaran berikutnya. Ke depan, perencanaan akan disusun lebih realistis dengan mempertimbangkan potensi blokir anggaran, dinamika kebijakan, serta pergerakan pegawai, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih optimal dan sesuai dengan kondisi riil organisasi. Selain itu, data mutasi pegawai akan menjadi dasar dalam perencanaan belanja pegawai agar alokasi anggaran lebih akurat dan tidak menimbulkan sisa anggaran yang besar.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025 dapat dikategorikan baik, dengan capaian 75,27% dari total pagu. Meskipun belum mencapai 100%, capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Adanya pagu blokir serta mutasi 3 (tiga) pegawai menjadi faktor yang memengaruhi tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Namun demikian, melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan pada Tahun anggaran berikutnya realisasi anggaran dapat lebih optimal dan mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi secara maksimal.



3.6 KINERJA IMPLEMENTASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah salah satu predikat yang diberikan kepada unit kerja pemerintah atau institusi yang berhasil memenuhi standar reformasi birokrasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. WBK adalah bagian dari program Zona Integritas (ZI) yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

a. Tujuan Wilayah Bebas Korupsi

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Membangun sistem yang mencegah penyimpangan dan meningkatkan keterbukaan dalam proses pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Memberikan layanan yang cepat, tepat, dan efisien kepada masyarakat.
- 3) Menciptakan Budaya Kerja Anti-Korupsi: Mendorong integritas di setiap level organisasi pemerintah.

b. Ciri-Ciri Wilayah Bebas Korupsi

- 1) Transparansi: Semua proses administrasi dan pelayanan dilakukan secara terbuka, Pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimalkan interaksi langsung yang rawan korupsi.
- 2) Akuntabilitas: Tanggung jawab atas setiap keputusan atau penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, Pengawasan internal dan eksternal yang aktif.
- 3) Pelayanan Prima: Pelayanan publik bebas pungutan liar (pungli), Proses yang lebih sederhana dan ramah kepada masyarakat.
- 4) Pencegahan Korupsi: Penerapan sistem whistleblowing, Pelaporan dan evaluasi tindak lanjut dari setiap pengaduan.

c. Tahapan Menuju WBK

Untuk mencapai predikat WBK, sebuah unit kerja perlu melalui beberapa tahapan berikut:

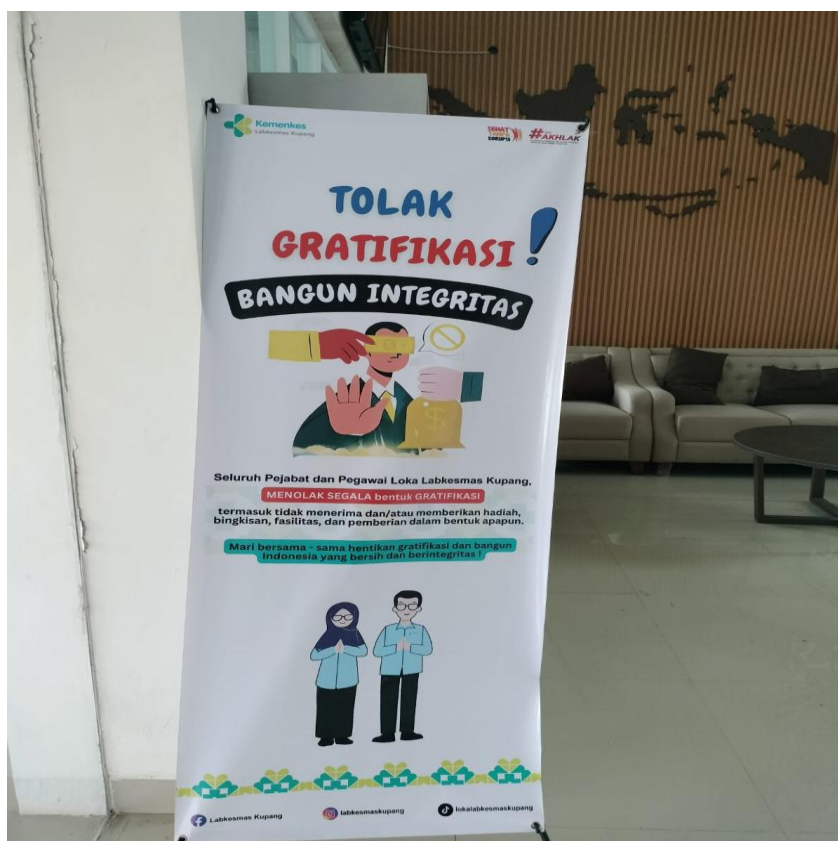
- 1) Komitmen Pimpinan: Pemimpin unit kerja menunjukkan komitmen nyata dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
- 2) Pembangunan Zona Integritas (ZI): Unit kerja menetapkan diri sebagai



zona integritas dengan menyusun dan menerapkan program- program reformasi birokrasi ; Fokus pada area seperti manajemen perubahan, tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- 3) Penilaian Internal: Unit kerja dinilai oleh inspektorat internal atau tim khusus untuk memastikan implementasi yang sesuai.
- 4) Penilaian Eksternal: Tim independen (misalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) melakukan verifikasi dan validasi.
- 5) Penghargaan Predikat WBK: Jika berhasil memenuhi kriteria, unit kerja mendapatkan predikat WBK.

Pelaksanaan WBK di Loka Labkesmas Kupang efektif berjalan Tahun ini, salah satu unit yang telah dibentuk adalah Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang terdiri dari 3 orang staf (ketua dan anggota 2 orang), sampai saat ini tidak ada laporan terkait gratifikasi di Loka Labkesmas Kupang. Pelaksanaan WBK di Loka Labkesmas juga dihadapi dengan berbagai kendala antara lain ketersediaan dokumen WBK, kekurangan SDM hal ini berimbas pada staf/pegawai yang melaksanakan tugas rangkap sehingga beban kerja bertambah, pembekalan bagi tim WBK satker dan seluruh staf terkait materi WBK masih kurang.



Gambar 3.9 Banner Terkait Wilayah Bebas Korupsi di Loka Labkesmas Kupang

d. Hasil penilaian WBK Loka Labkesmas Kupang

Adapun hasil penilaian WBK Loka Labkesmas Kupang seperti gambar berikut :

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Nilai Minimum
A. PENGUNGKIT		60.00					
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	2.74	2.42	5.16	64.54%	OK
2.	PENATAAN TATALAKSANA	7.00	0.94	0.34	1.28	18.26%	Tidak Lulus
3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	4.79	3.00	7.79	77.92%	OK
4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	4.38	2.94	7.32	73.15%	OK
5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	5.94	6.25	12.19	81.29%	OK
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	3.56	2.51	6.07	60.68%	OK
TOTAL PENGUNGKIT					39.81	66.35%	Tidak Lulus
B. HASIL		40.00					
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22.50			0.00	0.00%	Tidak Lulus
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	17.50			0.00	0.00%	Tidak Lulus
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00			0.00	0.00%	Tidak Lulus
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17.50			0.00	0.00%	
-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17.50			0.00	0.00%	Tidak Lulus
TOTAL HASIL					0.00	0.00%	
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS					39.81		Tidak

Gambar 3.10 Hasil Penilaian WBK Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan dan efektivitas implementasi program reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.



Berdasarkan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025 sebesar 39,81. Kinerja Evaluasi Implementasi WBK tersebut belum mencapai target Perjanjian Kinerja Loka Labkesmas Kupang. Capaian persentase IKK kinerja implementasi WBK Satker dibandingkan dengan target sebesar 60,12%. Penilaian tersebut tergolong rendah (dari total target skala 75), yang mengindikasikan bahwa implementasi reformasi birokrasi di Loka Labkesmas Kupang masih jauh dari target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan signifikan dalam berbagai aspek yang dinilai, seperti manajemen perubahan, akuntabilitas, efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya manusia. Adapun tindak lanjut yang perlu dilakukan meliputi Nilai ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan rencana aksi perbaikan, dan perlu fokus pada area-area dengan nilai terendah berdasarkan evaluasi tersebut.

3.7 PERSENTASE ASN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA

Kompetensi ASN merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Peningkatan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pasal 49 yang menyatakan bahwa setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi, Kemenkes telah menetapkan kewajiban pengembangan kompetensi minimal 20 JPL sebagai salah satu indikator kinerja pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan menjadi salah satu ritual dalam Perubahan Budaya Kerja Kemenkes Tahun 2025.

Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang memiliki Sumber Daya Manusia yang memiliki hak untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Berdasarkan perjanjian kinerja target presentase jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak 20 JPL sebesar 80 % dari jumlah pegawai.

a. Hasil Kegiatan Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi pegawai Loka Labkesmas Kupang sudah dilakukan oleh semua pegawai, dilakukan dengan metode daring maupun luring. Beberapa kegiatan pengembangan kompetensi meliputi pemberantasan korupsi, bimtek



disiplin PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dan pengembangan kompetensi lainnya yang dilakukan secara mandiri. Adapun rincian peningkatan kompetensi pegawai Loka Labkesmas Kupang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.16 Daftar Rekapitulasi Peningkatan Kapasitas SDM Tahun 2025

No	Nama	Jumlah JPL				Total JPL
		TW1	TW2	TW3	TW4	
1	Majematang Mading, SKM.,M.Ked.Trop	27	64	12,3	32	123
2	Rahmat D.J Langga, S.Sos	53	32	34,3		119,5
3	Fridolina Mau, S.Si. M.Sc	75,5	59	101,6	13,5	249,6
4	Dr. Muh.Kazwaini, SKM. M.Kes	52,5	25,1	9	13,5	100,1
5	Ruben Wadu Wila, SKM. M.Sc	13	31	60	13,5	117,5
6	Ni Wayan Dewi Adnyana, S.Si	50,5	16	289	13,5	369
7	Elfrida Frydolin Mola Wuwur, SE	15	8,3	4		28,3
8	Asterius N. L. Ate	2	25			27
9	Monika Noshirma, SKM. M.Kes	62,5	61		25,5	149
10	Mefi M. Tallan, S.Si	73,5	31,3	41,6	13,5	159,9
11	Anderia K. Bulu, S.Si	55	9,8	10	5,3	80,1
12	Hanani M. Laumalay, SKM.,M.Sc	11	37	50		98
13	Benyamin Jeman, A.Md	0	8	40,3		48,3
14	Ira Indriaty Paskalita B. Sopi, SKM. M.Kes	49	8			57
15	Maria A. Mapada, SKM	48,5	50,5	9,5		108,5
16	Varry Lobo, SKM	55	21	4,1	18	98,1
17	Klementin Ragu	42	5			47
18	Melkianus N. Jitu	4	43	4,5		51,5
19	Anselmus Tamo Ama Bulu	6	30	14,8		50,8
20	Agus Fatmawijaya	29	18,3	6		53,3
21	Jeriyanto Leba Dara	43,4	8	16,3		67,8
22	Ruth Victoria Sinadia	0	29	5		34
23	Oktavianus K. Pono	0	9,3			9,3
24	Justus Tangkunyah	56,5	47	66,6	17	187,1
25	Eka Triana	77,5	29,8	32,8	17	157,1
26	Damaris Pura Tanya	21,5	25,9	24,11	28,1	99,61
27	Ro Rabian Rein Roza Tampubolon		64	93,7	670,1	827,8
28	Yudhy Gollu Wola		49,3	49,5	674	772,8



29	Oyang Bendelina Reo		33	47,5	673,5	754
30	Santi Sofia Pello		39	29,3	30	98,3
31	Ronaldo Eureka Sonbai		33,5	59,8		93,3
32	Gregorius Edward Muda		33	17,3		50,6
33	Ninda Putri Yunistira Amtaran		55	100	13,5	168,5
34	Joshua Septianto Nenotek		74	66,5	725,5	866
35	Theresia Mooy		43	21	17	81
36	Made Dwi Sekarwati		41	77,7	15,5	134,2
37	Annisa Ulfa Septiana Arisanti		63,3	30,9	28,3	122,5
38	Anisya Nursyahbani		60	44,3	23	127,3
39	Ruci Nur'aini		45	84,9	64,5	194,4
40	Yosef Darius Kolo		48,3	44,9	19	112,2
41	Konstantinus Firminus Tapo		46	48,1	79,7	173,8

Capaian persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi minimal 20 JPL sebesar 97,5% menunjukkan komitmen organisasi yang tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia. Hampir semua pegawai telah memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan, sehingga indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi tercapai 97,5% dari target 80%. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program peningkatan kompetensi telah berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik.

b. Bimbingan Teknis Rutin dan Berjenjang

Kegiatan teknis yang sudah diikuti oleh staf Loka Labkesmas Kupang pada Tahun 2025 adalah Bimbingan Teknis Surveilans Vektor Berbasis Laboratorium. Pada kegiatan ini diikuti oleh 3 (tiga) pegawai yang bertugas sebagai narasumber yaitu:

- 1) Dr. Muhammad Kazwaini, S.KM., M.Kes.
- 2) Hanani M. Laumalay, SKM., M.Sc
- 3) Ni Wayan Dewi Adnyana, S.Si

Pada Tahun 2025, pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui Learning Management Sistem (LMS) dan Knowledge Management Sistem (KMS) menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperkuat. Tingkat partisipasi pegawai dalam mengikuti pembelajaran mandiri



melalui LMS sudah mulai meningkat, di mana sebagian besar pegawai telah terdaftar dan aktif mengakses modul pelatihan. Namun demikian, konsistensi dalam menyelesaikan seluruh materi masih bervariasi, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar keterlibatan pegawai dapat merata. Dari sisi hasil pembelajaran, terdapat peningkatan nilai rata-rata post-test dibandingkan pre-test, yang menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pemahaman dan penguasaan materi. Hal ini menjadi indikasi bahwa pembelajaran daring mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pengetahuan pegawai.

Di sisi penerapan, sebagian pegawai telah mulai mengintegrasikan hasil pembelajaran dalam pelaksanaan tugas, khususnya pada kegiatan pengembangan laboratorium dan peningkatan mutu layanan. Meskipun demikian, penerapan tersebut belum sepenuhnya merata karena belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk memastikan keberlanjutan implementasi di lapangan.

Secara umum, capaian peningkatan kompetensi pada semester ini sudah berada pada arah yang benar, dengan adanya peningkatan partisipasi, peningkatan hasil belajar, serta mulai adanya penerapan ilmu dalam pekerjaan. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, perlu dilakukan langkah tindak lanjut berupa peningkatan sosialisasi dan pendampingan penggunaan LMS/KMS, pengintegrasian capaian pembelajaran dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, diharapkan pada semester berikutnya keterlibatan pegawai semakin optimal, penerapan ilmu lebih luas, dan peningkatan kompetensi dapat dirasakan secara nyata dalam mendukung pengembangan organisasi.

3.8 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG TELAH TUNTAS DITINDAKLANJUTI DITJEN KESMAS

Merebaknya Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan berbagai akibat dalam berbagai segi kehidupan terutama dalam bidang kesehatan. Sebagai tanggapan atas kasus Covid-19, maka Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Atas dasar Keputusan Menteri Kesehatan ini,



pada Tahun 2021 juga terdapat beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang diberikan anggaran untuk membangun fasilitas laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19. Salah satu satuan kerja yang mendapat anggaran pembangunan fasilitas laboratorium adalah Loka Litbangkes Kupang.

Sebagai wujud upaya pemerintah pusat untuk membangun gedung laboratorium pemeriksaan Covid-19 di kawasan Nusa Tenggara, Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.11.913.593.000,- dengan rincian Rp. 11.250.000.000,- untuk pembangunan fisik gedung laboratorium BSL-2 dan untuk pengawasan sebesar Rp. 500.813.000,- Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan Gedung Laboratorium BSL-2 mengalami hambatan karena penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai masa kontrak kerja. Sebagai akibatnya pekerjaan menjadi mangkrak dan baru dilanjutkan kembali penyelesaian pembangunannya pada Tahun anggaran 2023.

Timbulnya masalah pengembalian jaminan pelaksanaan ini terjadi karena Pejabat Pembuat Komitmen pada saat itu lalai dan tidak melakukan klain atas Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Laboratorium BSL-2 senilai Rp.500.639.400,- pada lembaga penjamin PT Jamkrida NTT. Sebagai konsekuensinya, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia pada saat itu harus melakukan penyetoran kembali jaminan pelaksanaan ke kas negara.

Tahun 2025 telah dilakukan penyetoran terhadap jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan yang telah disetor berjumlah Rp.444.851.163,- (88,85%) dari total jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 500.639.400,- Oleh karena itu, sisa jaminan pelaksanaan yang belum disetor masih sebesar Rp.55.788.237,- Seperti tertera pada tabel dibawah. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyetoran jaminan pelaksanaan ini, akan terus mengupayakan untuk dapat menyelesaikan tunggakan ini.



Tabel 3.17 Rincian Penyetoran Pengembalian Jaminan

No	Tanggal Setor	Nilai	Ket
1	13 Oktober 2022	Rp. 2.000.000	Sudah disetor
2	20 Desember 2022	Rp. 2.000.000	Sudah disetor
3	27 Maret 2023	Rp. 1.800.000	Sudah disetor
4	15 November 2023	Rp. 431.551.163	Sudah disetor
5	2 Mei 2024	Rp. 5.000.000	Sudah disetor
6	16 Mei 2024	Rp. 500.000	Sudah disetor
7	24 Desember 2024	Rp. 1.000.000	Sudah disetor
8	12 Desember 2025	Rp. 1.000.000	Sudah disetor
	Total	Rp. 444.851.163	88,85%
	Sisa	Rp. 55.788.288	

Tindak Lanjut :

- a. Akan terus dilakukan pengembalian jaminan pelaksanaan dengan mencicil ke kas negara.
- b. Telah berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkes dalam rangka penghapusan Kontruksi Dalam Pekerjaan (KDP). Hal ini berdasarkan hasil konsultasi dengan KPKNL Kupang, bahwa syarat untuk melakukan penghapusan KDP harus ada dokumen dari APIP dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kemenkes yang isinya alasan dilakukannya penghapusan KDP.



B. PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN SATUAN KERJA LAINNYA

Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas memiliki 4 Loka Labkesmas di beberapa wilayah di Indonesia, berikut ini merupakan tabel perbandingan capaian kinerja dari 4 Loka Labkesmas.

Tabel 3.18 Perbandingan dengan UPT Loka Labkesmas

No	IKK	Target	Realisasi			
			LLKM Waikabubak	LLKM Baturaja	LLKM Tanah Bumbu	LLKM Pangandaran
1	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	5	12	21	9	7
2	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000	25.090	24742	13.793	10.963
3	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100	100	150	100	100
4	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2	3	7	4	15
5	Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring lembaga institusi nasional dan/atau internasional	5	12	8	9	16
6	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100	100	100	100	100
7	Persentase realisasi anggaran	96	86,84	88.07	79,53	82,2
8	Nilai Kinerja Anggaran	92,35	96,74	97.58	96,98	98,59
9	Kinerja implementasi WBK Satker	75	39,81	76.74	77,32	78,95
10	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80	95	100	100	100
11	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas	77	87,5	90.32	87,25	95,5
12	Indeks Kualitas SDM Labkesmas	81	81,17	83.67	84,94	86
13	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Labkesmas	3,95	3,60	4.24	3,28	3,28



Analisis Per Indikator Kinerja dari 13 indikator, sebagian besar indikator kinerja teknis, layanan, dan SDM menunjukkan kinerja sangat baik, dengan analisis sebagai berikut :

1. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium

Seluruh LLKM melampaui target 5 rekomendasi. Capaian tertinggi terdapat pada **LLKM Baturaja (21)**, menunjukkan kemampuan analisis data laboratorium yang sangat baik dan pemanfaatan hasil surveilans sebagai dasar rekomendasi kebijakan. Kinerja ini mencerminkan efektivitas fungsi intelijen epidemiologi berbasis laboratorium.

2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel

Semua LLKM berhasil melampaui target 10.000 pemeriksaan. **LLKM Waikabubak (25.090)** dan **Baturaja (24.742)** menunjukkan kapasitas layanan yang sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan kesiapan sarana, SDM, serta kepercayaan pemangku kepentingan terhadap layanan laboratorium.

3. Persentase bimbingan teknis rutin dan berjenjang

Seluruh LLKM mencapai target 100%, capaian tertinggi terdapat pada **LLKM Baturaja mencapai 150%**. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam pembinaan teknis wilayah binaan serta keberhasilan pelaksanaan fungsi pembinaan dan penguatan kapasitas jejaring laboratorium.

4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)

Seluruh LLKM melampaui target minimal 2, dengan capaian tertinggi pada **LLKM Pangandaran (15)**. Hal ini mencerminkan kesadaran dan komitmen tinggi terhadap mutu, validitas, serta akurasi hasil pemeriksaan laboratorium.

5. Jumlah MoU/PKS/Forum Kerja Sama

Seluruh LLKM melampaui target 5 kerja sama. **LLKM Pangandaran (16)** dan **Waikabubak (12)** menunjukkan jejaring kolaborasi yang luas. Capaian ini memperkuat sinergi lintas sektor dan berkontribusi pada keberlanjutan program dan peningkatan kapasitas layanan.

6. Standar minimal sistem pengelolaan biorepositori

Seluruh LLKM mencapai **100%**, menunjukkan keseragaman penerapan standar minimal pengelolaan biorepositori. Hal ini menjadi fondasi penting bagi pengelolaan spesimen yang aman, tertelusur, dan berkualitas.



7. Persentase realisasi anggaran

Seluruh LLKM **belum mencapai target 96%**, dengan capaian terendah pada **LLKM Tanah Bumbu (79,53%)**. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala dalam perencanaan, penjadwalan, atau pelaksanaan kegiatan, serta blokir pagu yang cukup besar.

8. Nilai Kinerja Anggaran

Seluruh LLKM melampaui target 92,35, dengan capaian tertinggi pada **LLKM Pangandaran (98,59)**. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran belum optimal, kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran dinilai sangat baik.

9. Kinerja implementasi WBK Satker

Sebagian besar LLKM melampaui target 75, kecuali **LLKM Waikabubak (39,81)** yang masih jauh **di** bawah target. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola, budaya integritas, dan pengendalian internal secara lebih intensif.

10. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Seluruh LLKM melampaui target 80%, dengan capaian hingga 100% pada sebagian besar LLKM. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan SDM dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.

11. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas

Seluruh LLKM berada jauh di atas target 77. Capaian ini menandakan bahwa layanan laboratorium dinilai responsif, berkualitas, dan memenuhi ekspektasi pengguna layanan.

12. Indeks Kualitas SDM Labkesmas

Seluruh LLKM mencapai dan melampaui target 81. Hal ini mencerminkan kualitas kompetensi, kinerja, dan profesionalisme SDM yang relatif merata di seluruh LLKM.

13. Nilai Maturitas Manajemen Risiko Labkesmas

Capaian indikator ini masih bervariasi. **LLKM Baturaja (4,24)** melampaui target 3,95, sedangkan Pangandaran **dan Tanah Bumbu (3,28)** belum mencapai target. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan penerapan manajemen risiko secara konsisten, terutama dalam identifikasi, mitigasi, dan monitoring risiko.



C. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi realisasi anggaran Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang Tahun 2025 berdasarkan indikator kerja sebesar 52,86% yang secara rinci efisiensi berdasarkan RO sebagai berikut:



Tabel 3.19 Analisis Efisiensi Anggaran Berdasarkan Indikator Tahun 2025

Kode	Rincian RO	Capaian RO per RO (CRO)	Alokasi anggaran (AARO)	Realisasi anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO	Efisiensi (%)
	-1	-2	-3	-4	(5)=(3) x (2)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6):(5)*100%
6993	Peningkatan Fasilitas, Mutu, dan Tata Kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat						
Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan							
BGD.002	Penilaian Kelayakan Operasional Layanan Labkesmas Melalui Akreditasi	100%	1.700.000	1.700.000	1.700.000	-	0,00
Sarana Bidang Kesehatan							
CCB.002	Pemeliharaan Alat Kesehatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	100%	10.000.000	9.707.300	10.000.000	292.700	2,93
Pelatihan Bidang Kesehatan							
DCM.001	Pelatihan Tata Kelola Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	100%	84.511.000	62.098.751	84.511.000	22.412.249	26,52
Koordinasi							
PEA.001	Koordinasi Pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Hs)	100%	21.020.000	15.030.916	21.020.000	5.989.084	28,49
Kerja sama							
PEC.001	Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Nasional	100%	45.696.000	42.768.749	45.696.000	2.927.251	6,41
Pelayanan Publik Lainnya							
QAH.001	Layanan Deteksi Dini dan Respon Kejadian Penyakit Menular	100%	1.017.691.000	996.907.298	1.017.691.000	20.783.702	2,04
QAH.003	Layanan Kewaspadaan Dini Berbasis Laboratorium (HS)	100%	9.740.000	8.353.798	9.740.000	1.386.202	14,23
Sarana Bidang Kesehatan							
RAB.005	Penyediaan Reagen dan BMHP Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	100%	641.159.000	584.801.580	641.159.000	56.357.420	8,79
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah							
UBA.001	Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat	100%	48.200.000	39.994.685	48.200.000	8.205.315	17,02
4812	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan						



Kode	Rincian RO	Capaian RO per RO (CRO)	Alokasi anggaran (AARO)	Realisasi anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO	Efisiensi (%)	
Layanan Dukungan Manajemen Internal								
EBA.956	Layanan BMN	100%	16.581.000	14.530.994	16.581.000	2.050.006	12,36	
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	100%	14.905.000	11.240.800	14.905.000	3.664.200	24,58	
EBA.962	Layanan Umum	100%	351.090.000	295.573.060	351.090.000	55.516.940	15,81	
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	100%	5.527.000	-	5.527.000	5.527.000	100,00	
EBA.994	Layanan Perkantoran	100%	6.400.767.000	5.484.278.110	6.400.767.000	916.488.890	14,32	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal								
EBB.951	Layanan Sarana Internal		49.000.000	49.000.000	49.000.000	-		
Layanan Manajemen SDM Internal								
EBC.954	Layanan Manajemen SDM Internal	100%	44.647.000	20.726.232	44.647.000	23.920.768	53,58	
Layanan Manajemen Kinerja Internal								
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	30.155.000	24.333.358	30.155.000	5.821.642	19,31	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	16.581.000	7.606.310	16.581.000	8.974.690	54,13	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	100%	34.382.000	23.723.540	34.382.000	10.658.460	31,00	
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	100%	5.674.000	-	5.674.000	5.674.000	100,00	
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	100%	5.541.000	-	5.541.000	5.541.000	100,00	
	Jumlah	100%	8.844.827.000	7.684.021.683	8.844.827.000	1.160.805.317	13,12	



Melihat hasil analisis efisiensi anggaran Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025, diketahui bahwa seluruh Rincian Output (RO) pada Program Peningkatan Fasilitas, Mutu, dan Tata Kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat serta Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan telah mencapai capaian kinerja output (CRO) sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target output kegiatan dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan, meskipun tidak seluruh anggaran terserap secara penuh.

Dari total alokasi anggaran sebesar Rp 8.844.827.000, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp 7.684.021.683, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.160.805.317 atau sebesar 13,12%. Selisih antara alokasi anggaran berbasis kinerja (AARO x CRO) dengan realisasi anggaran (RARO) tersebut mencerminkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, di mana output tetap tercapai 100% dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan.

Efisiensi anggaran terlihat pada hampir seluruh kegiatan, antara lain pada kegiatan Pelatihan Tata Kelola Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan tingkat efisiensi sebesar 26,52%, Koordinasi Pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebesar 28,49%, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi sebesar 24,58%, Layanan Umum sebesar 15,81%, serta Layanan Perkantoran sebesar 14,32%. Selain itu, efisiensi juga terlihat signifikan pada Layanan Manajemen SDM Internal sebesar 53,58% dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar 54,13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal.

Pada beberapa kegiatan, seperti Layanan Data dan Informasi, Layanan Reformasi Kinerja, dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan, tercatat efisiensi sebesar 100% karena tidak terdapat realisasi anggaran meskipun capaian output tercatat 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa output kegiatan dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya internal, optimalisasi sarana yang telah tersedia, atau integrasi dengan kegiatan lain, sehingga tidak memerlukan tambahan anggaran.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien, di mana seluruh target output dapat dicapai dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah dari alokasi yang direncanakan. Kondisi ini sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah serta mencerminkan kemampuan unit kerja dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi kualitas dan capaian kinerja. Dengan demikian, efisiensi anggaran yang



terjadi dapat dinilai sebagai efisiensi yang positif dan produktif, bukan sebagai kegagalan penyerapan, karena tetap menghasilkan output sesuai target.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025 sebesar 13,12% merupakan hasil dari pengelolaan anggaran yang efektif dan optimal. Seluruh kegiatan mampu mencapai target output 100% meskipun realisasi anggaran tidak sepenuhnya terserap, sehingga menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara hemat, tepat guna, dan bertanggung jawab

1. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek penting yang memiliki potensi besar untuk menjalankan aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terbagi menjadi dua jenis yakni PNS dan PPPK. Analisis beban kerja (ABK) adalah proses untuk menentukan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. ABK juga digunakan untuk menentukan jumlah pegawai dan beban kerja yang tepat.

ABK merupakan teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. ABK juga merupakan salah satu amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil ABK digunakan untuk menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK.

Berdasarkan peta jabatan Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) kebutuhan pegawai di Loka Labkesmas sangat kurang. Dalam peta jabatan Loka Labkesmas ideal kebutuhan pegawai sebanyak 61 formasi dengan jumlah pegawai 118 orang. Sedangkan saat ini di Loka Labkesmas Kupang baru terisi 21 formasi dengan jumlah pegawai 40 ASN, yang terdiri dari :

Eselon IV	: 2 Orang
JF Teknis	: 24 Orang
JF Administrasi	: 6 Orang
JP Teknis	: 3 Orang
JP Admin	: 5 orang

Jadi gap kebutuhan pegawai di Loka Labkesmas sangat besar, dari jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak 118 orang pegawai yang ada saat ini baru 40 orang ASN jadi masih terdapat kebutuhan 78 orang pegawai. Untuk formasi yang dibutuhkan sebanyak 63 formasi sedangkan yang terpenuhi baru 21 formasi jadi kekurangan sebanyak 42 formasi. Pada Tahun 2025 Loka Labkesmas mendapatkan 15 orang CPNS yang terdiri dari 12 tenaga teknis dan 3



tenaga administrasi. Matriks jumlah pegawai dan kebutuhan berdasarkan peta jabatan sebagai berikut :

Tabel 3.20 Matriks Jumlah Pegawai dan Kebutuhan berdasarkan Peta Jabatan Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025

No	Jabatan	Jml Saat ini	Kebutuhan	Kurang	Lebih
1	Entomolog Kesehatan Ahli Madya	0	1	1	
2	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	0	2	2	
3	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	0	2	2	
4	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya	0	1	1	
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	0	2	2	
6	Dokter Ahli Muda	0	1	1	
7	Administrator Kesehatan Ahli Muda	0	1	1	
8	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	0	2	2	
9	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	4	5	1	
10	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	0	1	1	
11	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	0	5	5	
12	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda	0	2	2	
13	Teknisi Elektromedis Ahli Muda	0	1	1	
14	Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	0	1	1	
15	Dokter Ahli Pertama	1	2	1	
16	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	2	2	0	
17	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	2	3	1	
18	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	2	4	2	
19	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	1	2	1	



20	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	0	1	1	
21	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0	
22	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	4	7	3	
23	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	1	3	2	
24	Teknisi Elektromedis Ahli Pertama	0	2	2	
25	Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1	2	1	
26	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	0	2	2	
27	Entomolog Kesehatan Mahir	0	1	1	
28	Epidemiolog Kesehatan Mahir	0	1	1	
29	Perawat Mahir	0	1	1	
30	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	0	1	1	
31	Pranata Komputer Mahir	0	1	1	
32	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	0	4	4	
33	Sanitarian/ Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir	0	1	1	
34	Teknisi Elektromedis Mahir	0	1	1	
35	Teknisi Litkayasa Mahir	0	0	0	
36	Entomolog Kesehatan Terampil	0	2	2	
37	Epidemiolog Kesehatan Terampil	0	2	2	
38	Perawat Terampil	0	2	2	
39	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	0	1	1	
40	Pranata Komputer Terampil	0	1	1	
41	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	3	6	3	
42	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	1	2	1	
43	Teknisi Elektromedis Terampil	1	2	1	
44	Teknisi Litkayasa Terampil	2	0	0	Alih jabatan
45	Penata Kelola Layanan Kesehatan	2	2	0	
46	Pengelola Layanan Kesehatan	0	2	2	



47	Arsiparis Ahli Muda	0	2	2	
48	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	1	0	
49	Arsiparis Ahli Pertama	0	2	2	
50	Perencana Ahli Pertama	1	1	0	
51	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	2	1	
52	Arsiparis Penyelia	0	2	2	
53	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	0	1	1	
54	Pranata Keuangan APBN Mahir	0	1	1	
55	Arsiparis Mahir	0	2	2	
56	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	0	1	1	
57	Penata Laksana Barang Terampil	0	1	1	
58	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1	0	
59	Arsiparis Terampil	1	2	1	
60	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	0	1	1	
61	Penata Layanan Operasional	1	1	0	
62	Pengelola Layanan Operasional	2	2	0	
63	Operator Layanan Operasional	2	2	0	

D. Penghargaan

Selama melaksanakan program kegiatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Loka Labkesmas Kupang telah melaksanakan secara optimal dengan menggunakan sumber daya dan potensi yang dimiliki Loka Labkesmas Kupang sebagai salah satu UPT dengan kepatuhan interaksi pelayanan publik Kementerian Kesehatan dengan nilai **74,82** memperoleh predikat Baik, dengan masa berlaku Januari 2025 sampai Desember 2027.



Gambar 3.11 Tanda Penghargaan UPT dengan kepatuhan interaksi pelayanan publik Kemenkes





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban Loka Labkesmas Kupang secara berkala. Laporan disampaikan dengan menyampaikan analisis kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025 disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Satker Tahun 2025, Indikator Kinerja Loka Labkesmas Kupang berjumlah 11 Indikator. Enam (6) Indikator merupakan penjabaran dari program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan sasaran program meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratodium dalam bentuk kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dan sasaran kegiatan berupa meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan. Lima (5) indikator merupakan penjabaran dari program dukungan manajemen dengan sasaran program meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan dalam bentuk kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program dan sasaran kegiatannya yaitu meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya. Adanya revisi Perjanjian Kinerja pada semester II menjadikan adanya perubahan indikator kinerja dari program dukungan manajemen. Perubahan tersebut yaitu dengan hilangnya indikator presentase realisasi anggaran dan kinerja implementasi WBK tidak ada lagi dan digantikan dengan indeks kepuasan pengguna layanan Labkesmas dan nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi (SPIPT).

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) IKK triwulan IV, sebanyak 9 (sembilan) Indikator Kinerja Loka Labkesmas Kupang telah memenuhi target dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang tidak mencapai target. Indikator Kinerja yang telah mencapai target adalah jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel (250,9%), Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium (240%), Persemntase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas (100%), mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) sebanyak 3 kali, Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository



(100%), indeks kepuasan pengguna layanan Labkesmas (113,6%), nilai kinerja anggaran (104,7%), indeks kualitas SDM Labkesmas (120%). Indikator Kinerja yang belum memenuhi target adalah nilai maturitas Sistem Pengendalian Inetrn Pemerintah Terintegrasi (SIPT) (91,13%) dan presentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas (93,32%).

Kinerja Loka Labkesmas Kupang secara umum telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, namun berbagai hal yang menjadi kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran selama Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam LAKIP ini agar dijadikan evaluasi bagi segenap individu dalam lingkup internal Loka Labkesmas Kupang, guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja Loka Labkesmas Kupang. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Loka Labkesmas Kupang perlu mempersiapkan sumber daya manusia disesuaikan dengan daya tupoksi organisasi; pengembangan teknis laboratorium kesehatan lebih difokuskan standar pemeriksaan laboratorium tier 4; kerjasama lintas sektor dengan memfasilitasi terbentuknya jejaring laboratorium surveilans pada Kementerian Kesehatan RI dengan mengikutsertakan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas serta membangun jejaring dengan beberapa UPT Kementerian Kesehatan lainnya. Oleh karena itu, beberapa langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Loka Labkesmas Kupang meliputi secara proaktif melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyusunan kebijakan bidang kesehatan agar diperoleh sinergitas yang dapat meningkatkan capaian indikator kinerja dimasa mendatang; mendorong SDM Teknis untuk senantiasa memperbarui kompetensi sesuai dengan jabatan yang dimiliki guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satker kedepan; secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

LAKIP ini diharapkan dapat menjadi alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan. Laporan ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik perbaikan kinerja dan perencanaan Tahun selanjutnya. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dan turut membantu mewujudkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Satker
 - a. Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
B.	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik		
II	Program : Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program:		
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan		
2	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat		
	Sasaran Kegiatan UPT:	1. Persentase realisasi anggaran	96%
		2. Nilai Kinerja Anggaran	80,1 NKA
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	3. Kinerja implementasi WBK Satker	75 Skala
		4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%
		5. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas*	95%

Kegiatan	Anggaran
1. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Rp. 2.886.103.000,-
2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat	Rp. 7.289.238.000,-
Total Anggaran DIPA Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Rp. 10.175.341.000,-

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

Majematang Mading, S.K.M., M.Ked.Trop

Halaman 2 dari 2

b. Perjanjian Kinerja Revisi Renstra Loka Labkesmas Kupang



**LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
KUPANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Majematang Mading
Jabatan : Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang
selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Maria Endang Sumiwi
Jabatan : Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2025

Pihak Kedua,

Maria Endang Sumiwi

Pihak Pertama,

Majematang Mading

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KUPANG

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sasaran Strategis		
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes	14. Persentase kabupaten/kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	55%
		16. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna*	33%
	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	33: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	91,96 (Nilai)
C	Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
	Sasaran Program: Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan Labkesmas	14.4. Persentase Labkesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	60%
		16.1. Persentase Labkesmas yang terakreditasi	9%
B	Kegiatan : Peningkatan fasilitas, mutu dan tata kelola Labkesmas		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola Labkesmas	16.1.1 Persentase Labkesmas dengan tata kelola sesuai standar	30%
LKM	Kegiatan : Peningkatan fasilitas, mutu dan tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola Labkesmas	16.1.1.a. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 specimen klinis dan/atau sampel
		16.1.1.b. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	5 rekomendasi
		16.1.1.c. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100%
		16.1.1.d. Jumlah MoU/PKS/Forum Kerja Sama atau forum koordinasi jejaring, Lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	5 MoU/PKS/ Laporan
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas	16.1.e. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 kali

Halaman 1 dari 2



No.	Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	fasilitas dan mutu labkesmas	14.4.g. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	100%
D	Program : Dukungan Manajemen		
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes	77 (Nilai)
		33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	92,35 (Nilai)
		33.3 Indeks Penerapan Sistem Merit Kemenkes	0,86 (Indeks)
		33.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)	3,95 (Nilai)
LKM	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan di Labkesmas		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	33.1.3 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas	77 (Nilai)
		33.2.3 Nilai Kinerja Anggaran Labkesmas	92,35 (Nilai)
		33.3.3 Indeks Kualitas SDM Labkesmas	81 (Nilai)
		33.4.12 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)	3,95 (Nilai)
		IKD 33.1 Persentase Realisasi Anggaran Labkesmas	96%

Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan fasilitas, mutu dan tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Rp. 2.546.139.000,-
2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan di Labkesmas	Rp. 7.629.202.000,-
Total Anggaran DIPA Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	Rp. 10.175.341.000

Pihak Kedua,

Maria Endang Sumiwi

Jakarta, Desember 2025
Pihak Pertama,

Majematang Mading

Halaman 2 dari 2

2. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja pada Loka Labkesmas Kupang Tahun 2025



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Kesehatan Primer dan Komunitas
Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Kupang
Jalan H.R. Koroh, Bello, Kec. Maulafa, Kota Kupang
Nusa Tenggara Timur, 85148
(0380) 8479005
<https://lokalabkesmaskupang.id>

**KEPUTUSAN KEPALA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
KUPANG**

NOMOR : HK.02.03/B.XII.3/675/2025

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT KUPANG**

NOMOR : HK.02.03/B.XII.3/018/2025

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PADA LOKA
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KUPANG TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KUPANG;**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja maka dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Kinerja Satuan Kerja Kantor Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pengelola Laporan Kinerja Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang Tahun 2025;
 - c. Bahwa nama-nama yang disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cukup cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Kinerja Satuan Kerja di Kantor Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150);
10. DIPA Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak, Nomor: SP DIPA- 024.03.2.690802/2025; tanggal 2 Desember 2024.

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PADA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KUPANG TAHUN 2025;
- KESATU : Keanggotaan Tim Pengelola Laporan Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang tahun 2025, yang selanjutnya disebut dengan TIM LKJ Satuan Kerja Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang Tahun 2025, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Laporan Kinerja Satuan Kerja Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertugas :
- Menganalisis data dan bahan untuk penyusunan LKj;
 - Mempersiapkan rapat koordinasi untuk kelancaran penyusunan LKj;
 - Mengkoordinasikan instansi terkait untuk validitas dan kelengkapan data capaian kinerja;
 - Menyusun LKj sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Menyempurnakan Laporan Kinerja jika ada koreksi dari pimpinan atau Tim Evaluasi;
 - Melakukan reviu atas laporan kinerja untuk memastikan keandalan informasi yang disajikan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Laporan Kinerja Satuan Kerja Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang Tahun 2025 bertanggungjawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Pengelola Laporan Kinerja Satuan Kerja Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Tim melaksanakan tugasnya mulai sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2025 dan atau sampai ditetapkannya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



- keputusan baru.
- KEENAM** : Evaluasi atas pelaksanaan tugas tim dilakukan secara berkala oleh Kepala Loka dan dapat dijadikan dasar penyesuaian keanggotaan atau kebijakan lebih lanjut.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 21 Agustus 2025
Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang,



Majematang Mading, SKM.,M.Ked.Trop

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA LABKESMAS
KUPANG
NOMOR : HK.02.03/B.XII.3/675/2025
TANGGAL : 21 Agustus 2025
TENTANG TIM LAPORAN KINERJA SATUAN
KERJA DI LINGKUNGAN LOKA LABKESMAS
KUPANG TAHUN 2025

**TIM PENGELOLA LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN LOKA LABKESMAS KUPANG 2025**

No	Nama	Jabatan	Perwakilan Tim Kerja
1	Damaris Pura Tanya, SKM.	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JFT)	Koordinator
2	Mefi Mariana Talan, S. Si.	Pranata Laboratorium Kesehatan	Anggota
3	Eka Triana, SKM	Teknisi Litkayasa/Pranata Laboratorium Perekayasa (JFU)	Anggota
4	Gregorius Edward Muda, S. Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama (JP)	Anggota
5	Santi Sofia Pello, S. Ak.	Perencana Ahli Pertama (JP)	Anggota

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 21 Agustus 2025
Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kupang,





Majematang Mading, SKM.,M.Ked.Trop

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



3. SOP Mekanisme Penyampaian Data dan Informasi dari Unit Kerja ke Unit penyusun LKj

	Nomor SOP : OT.02.02/B.XII.3/008/2025
	Tgl. Pembuatan : 2 Januari 2025
	Tgl. Revisi : -
	Tgl. Efektif : 6 Januari 2025
Disahkan oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak	
	
Majematang Mading, S.KM., M.Ked.Trop NIP. 197706152006042002	
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS	
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK	Nama SOP : Mekanisme Pengumpulan Data Capaian dari Unit Kerja kepada Tim LKj
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 6. PMK Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mekanisme penyusunan LKj. 2. Memahami indikator kinerja, perjanjian kinerja, serta dokumen perencanaan dan pelaporan instansi. 3. Mampu mengelola dan menyajikan data secara akurat dan terdokumentasi. 4. Memiliki kemampuan koordinasi antar unit kerja 5. Mampu mengoperasikan aplikasi pengolahan data dan pelaporan kinerja 6. Mampu menerapkan nilai-nilai organisasi BerAKHLAK
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemenuhan Standar Mutu Laboratorium 2. SOP Penerimaan, Pemilahan, Pencatatan, dan Penyimpanan Sampel 3. SOP Pengumpulan Data Skrining, Deteksi Dini, Surveilans dan/atau Invertigasi 4. SOP Pengelolaan Data Skrining, Deteksi Dini, Surveilans dan/atau Invertigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila Prosedur Pengumpulan Capaian dari Unit Kerja kepada Tim LKj tidak dilaksanakan, maka akan menghambat proses penyusunan laporan LKj	Dokumen disimpan sebagai arsip aktif di Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA DARI UNIT KERJA KE TIM PENYUSUN LKJ

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Loka	Tim Penyusun LKj	Unit Kerja	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Mengirim permintaan data kinerja ke seluruh unit	○	□	□	Surat permintaan data & format pelaporan	10	Surat permintaan data	
2	Menghimpun data realisasi indikator kinerja			□	Data kinerja + bukti dukung	60	Data kinerja unit	
3	Verifikasi internal data oleh kepala unit			□	Data terverifikasi	30	Data valid unit	
4	Penyampaian data ke Tim LKj			□	Data kinerja terverifikasi	10	Data diterima tim	
5	Verifikasi kelengkapan oleh Tim LKj		□	□	Data kinerja unit	30	Data hasil verifikasi	
6	Perbaiki data (jika belum sesuai)		□	□	Catatan revisi	30	Data revisi	
7	Finalisasi data kinerja		□	□	Data final	15	Data resmi LKj	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. SK Tim Pengumpulan Data dan Informasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja



KEPUTUSAN KEPALA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK
NOMOR : HK.02.03/B.XII.3/395/2025

TENTANG

TIM PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
PADA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja (LKJ), diperlukan data dan informasi kinerja yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mendukung tugas Tim Pengelola Laporan Kinerja Satuan Kerja, perlu menunjuk Penanggung Jawab Pengumpulan Data dan Informasi pada setiap unit kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak tentang Tim Pengumpulan Data dan Informasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja;
- d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pengumpulan Data dan Informasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak Nomor HK.02.03/B.XII.3/675/2025 Perubahan Keputusan Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak Nomor HK.02.03/B.XII.3/018/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Pada Pengelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KUPANG TENTANG TIM PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PADA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data dan Informasi dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja di lingkungan Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA** : Tim Penanggung Jawab Pengumpulan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim mengumpulkan data dan informasi kinerja sesuai tugas dan fungsi unit kerja masing-masing;
 2. Tim memastikan keakuratan, kelengkapan, dan validitas data capaian kinerja;
 3. Tim menyampaikan keakuratan, kelengkapan, dan validitas data capaian kinerja;
 4. Tim menyampaikan data dan informasi kinerja kepada Tim Pengelola Laporan Kinerja Satuan Kerja sesuai jadwal yang ditetapkan;
 5. Tim melakukan klarifikasi dan perbaikan data apabila diperlukan dalam proses penyusunan dan reviu LKj;
 6. Mendukung kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- KETIGA** : Tim bertanggung jawab kepada Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak dan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waikabubak
Pada tanggal : 3 Juli 2025
Kepala Loka Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Waikabubak,



Majematang Mading, SKM.,M.Ked.Trop

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA LOKA LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK

NOMOR : OT.02.02/B.XII.3/395/2025

TANGGAL : 3 Juli 2025

TENTANG TIM PENGUMPULAN DATA DAN
INFORMASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PADA
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT WAIKABUBAK TAHUN 2025

**TIM PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
PADA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Penugasan Ini
1	Gregorius Edward Muda, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Koordinator
2	Santi Sofia Pello, S.Ak.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
3	Damaris Pura Tanya, SKM	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Waikabubak

Pada tanggal : 3 Juli 2025

Kepala Loka Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Waikabubak,



Majematang Mading, SKM., M.Ked.Trop

5. Budaya Kerja berAKHLAK

Sudah menjadi kebutuhan hidup, bahwa kerja tanpa ada yang mengawasi dan merasa diawasi adalah tingkatan tertinggi dalam karir individu pegawai untuk menunjukkan eksistensi dirinya sebagai seorang abdi negara yang produktif dan bermanfaat untuk dirinya, institusinya, bangsa dan negara. Menjadikan dirinya sebagai seorang pegawai yang berguna membutuhkan penguatan dan kompetensi yang terus menerus yang dirujuk menjadi *grand design* lembaga agar setiap pegawai memiliki kompetensi yang meningkat sesuai kebutuhan setiap waktu. Perundang-undangan yang setiap saat terbit susul menyusul juga menjadi pegangan didalam peningkatan capaian individu pegawai dan lembaga agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya adalah *Core Values* (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK.



Pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Joko Widodo meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. *Core values* ASN menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah. Semangat dari penyeragaman *core values* ini adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman hingga akhirnya implementasi budaya kerja sesuai *core values* menjadi *mindset* seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya. dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” sebagai wujud nyata dari strategi penguatan budaya kerja lewat transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) dan semangat melaksanakan ketentuan perundang-undangan tentang ASN (UU 5 Tahun 2014). Untuk mendukung keterlaksanaannya di tataran kerja di lapangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021 sebagai landasan hukum dan pedoman pengimplementasiannya bagi setiap komponen ASN baik instansi pemerintah di tingkat kementerian, lembaga maupun instansi daerah.

MENPAN-RB pada Tahun 2024 menargetkan penguatan budaya BerAKHLAK dan merumuskan langkah strategis upaya pencapaian tersebut ke dalam sepuluh (10) langkah yang dilakukan secara bertahap di Tahun 2022 melalui (1) Penguatan komitmen lewat penyelenggaraan forum pimpinan, (2) Penyelarasan sistem yang dimulai lewat Sosialisasi Sistem Penilaian Individu *Core Values* BerAKHLAK dalam SKP berdasarkan Permenpan RB No. 6 Tahun 2022, (3) Perubahan individu yang dihasilkan lewat pelatihan Internalisasi BerAKHLAK, (4) Pemetaan Budaya yang dicapai lewat sosialisasi & partisipasi pengisian pengukuran kesehatan budaya organisasi / indeks BerAKHLAK, *Employee Engagement & Employer Branding*, (5) Penentuan Agenda Perubahan dalam penyusunan *roadmap*, rencana aksi program aktivitas budaya dan anggaran biaya, (6) Pengelolaan Agen Perubahan lewat aktivitas tim agen perubahan, (7) Eksekusi rencana aksi dalam sosialisasi *roadmap*, rencana aksi, simbol/artefak ke setiap ASN di instansi pemerintah, (8) Kampanye berkelanjutan lewat perancangan media dan materi serta implementasi komunikasi BerAKHLAK, (9) Monitoring & Evaluasi berkala dalam forum komunikasi berkala tim agen perubahan serta pelaporan program sosialisasi, internalisasi, dan aktivitas budaya BerAKHLAK, dan (10) Penghargaan melalui penganugerahan penghargaan atas pencapaian Indeks Budaya BerAKHLAK. Kesepuluh langkah strategis yang ditetapkan oleh MENPAN-RB merupakan upaya untuk mencapai target tahap aktivasi / aktualisasi pelaksanaan budaya Ber-AKHLAK di Tahun 2023. BBPMP Jateng sebagai salah satu instansi di bawah Kemendibudristek pada setiap apel pagi



hari Senin telah mengkampanyekan *Core Values* (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK kepada seluruh pegawainya agar ini dijadikan pedoman sebagai pegangan dalam bekerja dan melayani.

Core Values (Nilai-nilai Dasar) ASN BerAkhlaq Sebagai Patokan. Perlu disepakati patokan besar apa yang dipakai oleh lembaga sebagai payung besar yang sifatnya umum dalam melaksanakan WFA. WFA atau *Work From Anywhere* yaitu bekerja dan melaksanakan pekerjaan dari mana saja, maksudnya tidak hanya dari rumah tapi juga bisa melaksanakan pekerjaan di tempat-tempat lainnya. Ketika lembaga kerja model WFA diterapkan, semua pegawai memiliki landasan filosofis yang menyatu dalam dirinya ketika bekerja dan mencapai indikator kinerja utama (IKU) dan Sasaran kegiatan setiap Tahun berjalan sesuai dengan program dan ketersediaan anggaran. Untuk itu diperlukan pendalaman Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai kebutuhan mendasar bagi pegawai agar, tulisan panduan perilaku ini tidak sekedar dibaca tetapi terinternalisasi pada setiap individu pegawai agar bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam mencapai kinerja bermutu sebagai bagian dari tuntutan mencapai Visi, Misi dan Tujuan lembaga.

Isi *Core Values* (Nilai-nilai Dasar) ASN BerAkhlaq yang harus dipahami dan di internalisasi agar menjadi landasan filosofi bekerja pegawai adalah sebagai berikut:

a. Berorientasi Pelayanan

Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti.

Loka Labkesmas Kupang bukan merupakan kantor yang secara langsung memberikan layanan kepada masyarakat, namun sejak adanya perubahan tugas pokok dimana tidak hanya menghasilkan laporan penelitian tetapi juga harus dapat dimanfaatkan oleh stakeholder, maka hasil penelitian atau kajian harus diformulasikan menjadi sebuah rekomendasi yang rencana diadvokasikan dan akan bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.

Pada Tahun 2024 akan dihasilkan 5 rekomendasi kebijakan yang akan diadvokasikan pada 8 kabupaten di Propinsi NTT yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Timur, Belu, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, TTS. Dengan adanya perubahan ini menunjukkan bahwa kantor Loka Labkesmas Kupang akan berupaya untuk lebih berupaya memahami kebutuhan Masyarakat, Dimana setiap bentuk kegiatan penelitian ataupun kajian yang sebelum dilakukan perlu meminta masukan terhadap permasalahan dibidang Kesehatan yang



sedang dialami masyarakat. Dengan memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholder di daerah, Loka Labkesmas Kupang telah berupaya memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada Masyarakat melalui pemberian rekomendasi kebijakan yang secara cepat diberikan dan menjadi solusi pemecahan masalah kesehatan di daerah.

b. Akuntabel

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Pembentukan tim SKI, SPIP dan UPG di satuan kerja merupakan wujud komitmen pimpinan dan seluruh staf Kantor Loka Labkesmas Kupang untuk mewujudkan pelaksanaan tugas secara akuntabel. Pembentukan tim verifikator terhadap SPj (surat pertanggungjawaban) keuangan Loka Labkesmas Kupang juga merupakan bentuk upaya pelaksanaan tugas secara akuntabel, dimana verifikator tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen tetapi sekaligus memberikan keyakinan bahwa betul sebuah kegiatan itu dilaksanakan dengan benar. Keseluruhan tim yang dibentuk merupakan Upaya internal untuk melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.

c. Kompeten

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Loka Labkesmas Kupang akan terus mengalami perubahan terutama dalam tugas pokok dan fungsi. Seiring dengan berjalannya waktu, tugas pokok dan fungsi tersebut tidak hanya melakukan pemeriksaan laboratorium tetapi bagaimana hasil surveilans tersebut akan memberikan andil bagi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, hasil surveilans tidak sebatas pada pemeriksaan laboratorium, tetapi harus diformulasikan dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang perlu diadvokasi dan sedapat mungkin dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang dibuktikan dengan adanya regulasi oleh stakeholder sebagai bentuk pemanfaatannya.

Tentu dengan adanya perubahan yang terus terjadi, sudah menjadi tugas tugas pimpinan dan seluruh staf Kantor Loka Labkesmas Kupang untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Upaya meningkatkan kompetensi diri itu ditandai dengan adanya upaya mengikutkan staf dalam kegiatan pelatihan, magang, workshop, seminar, pertemuan-pertemuan yang keseluruhannya



mengarah pada Upaya meningkatkan kompetensi diri.

Pelaksanaan tugas yang baru sebagai laboratorium Kesehatan Masyarakat, secara perlahan seluruh staf terutama tenaga teknis dituntut untuk mempersiapkan diri dengan peningkatan kemampuan teknis dan pengadaan sarana pendukung laboratorium.

d. Harmonis

Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Pegawai Kantor Loka Labkesmas Kupang memiliki keragaman baik dari segi agama dan kepercayaan serta suku bangsa. Saat ini, pegawai Loka yang beragama Islam 7 orang, Katolik 7 orang, Protestan 13 orang dan Hindu 1 orang. Sementara dilihat dari suku bangsa, ada Timor, Sabu, Flores, Alor, Sumba, Sasak, Bali, Jawa, Sunda Bugis dan Minahasa. Selain keragaman suku dan agama, pegawai Loka Labkesmas Kupang juga memiliki latar belakang dan Tingkat Pendidikan yang berbeda-beda. Walaupun terdapat keberagaman, namun sikap saling menghargai berjalan dengan baik dan hal ini mendukung untuk terciptanya suasana kerja yang kondusif.

e. Loyal

Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Pimpinan dan seluruh staf kantor Loka Labkesmas Kupang memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan secara rutin sebagai perwujudan sikap loyal adalah dilaksanakannya apel pagi setiap hari Senin, setiap tanggal 17, perayaan HUT RI dan hari-hari lain yang sudah ditetapkan. Perayaan HUT RI biasanya diikuti oleh seluruh pegawai Loka Labkesmas Kupang dengan bergabung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat baik pengibaran pada pagi hari maupun penurunan bendera pada sore hari tanggal 17 Agustus. Kegiatan apel pagi setiap pekan pada hari Senin dan setiap bulan pada tanggal 17, dilaksanakan secara mandiri di halaman Kantor Loka Labkesmas Kupang. dalam kegiatan apel yang dilaksanakan secara mandiri, dilakukan pembacaan teks Pancasila dan Panca Prasetya Korpri sebagai wujud aspek loyal dari seluruh pegawai.



f. Adaptif

Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Bertindak proaktif.

Loka Labkesmas Kupang terus mengalami perubahan terutama dalam tugas pokok dan fungsi sehingga secara institusi maupun individual dituntut untuk cepat melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan yang terjadi.

g. Kolaboratif

Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Loka Labkesmas Kupang senantiasa melakukan kolaborasi yang menekankan keterbukaan dalam menerima kontribusi dari pihak-pihak yang berbeda, baik individu maupun organisasi, dengan tujuan menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Kolaborasi melibatkan penggunaan berbagai sumber daya secara efektif agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal.

6. Peta Jabatan Loka Labkesmas Kupang

Pegawai 28 orang terdiri dari :		
Es.I : 0	Es.III : 0	JF : 15
Es.II : 0	Es.IV : 2	JP : 11

Keterangan :	
KLS :	Kelas Jabatan
B :	Desetting (Keadaan Pegawai)
K :	Kebutuhan (Berdasarkan ABK)
+/- :	Selisih

KEPALA LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK Kelas 11

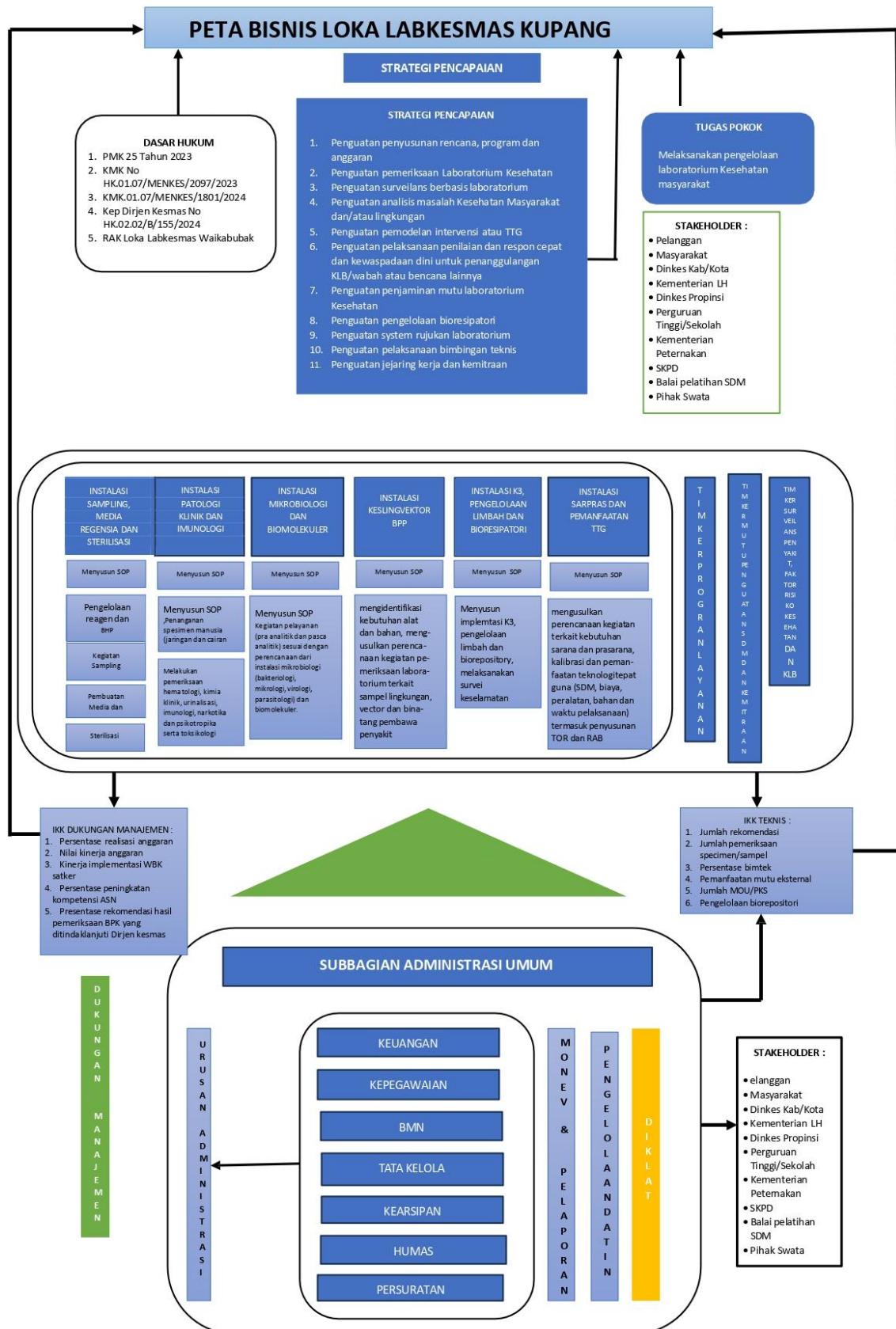
Kepala Subbagian Administrasi Umum Kelas 10

Jabatan	KLS	B	K	+/-
Entomolog Kesehatan Ahli Madya	11	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	11	0	2	-2
Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11	0	2	-2
Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya	11	0	1	-1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda	10	0	2	-2
Dokter Ahli Muda	10	0	1	-1
Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	0	1	-1
Entomolog Kesehatan Ahli Muda	9	0	2	-2
Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	4	5	-1
Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	9	0	1	-1
Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9	0	5	-5
Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda	9	0	2	-2
Teknisi Elektromedis Ahli Muda	9	0	1	-1
Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	9	0	1	-1
Dokter Ahli Pertama	9	0	2	-2
Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8	0	2	-2
Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	8	2	3	-1
Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	8	2	4	-2
Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8	1	2	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8	2	7	-5
Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	8	0	3	-3
Teknisi Elektromedis Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	0	2	-2
Entomolog Kesehatan Mahir	7	0	1	-1
Epidemiolog Kesehatan Mahir	7	0	1	-1
Perawat Mahir	7	0	1	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7	0	4	-4
Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir	7	0	1	-1
Teknisi Elektromedis Mahir	7	0	1	-1
Entomolog Kesehatan Terampil	6	0	2	-2
Epidemiolog Kesehatan Terampil	6	0	2	-2
Perawat Terampil	6	0	2	-2
Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6	0	6	-6
Sanitarian/Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	6	0	2	-2
Teknisi Elektromedis Terampil	6	0	2	-2
Teknisi Litkayasa Terampil	6	2	0	2
Penata Kelola Layanan Kesehatan	7	2	2	0
Pengelola Layanan Kesehatan	6	2	2	0

Jabatan	KLS	B	K	+/-
Arsiparis Ahli Muda	9	0	2	-2
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama	8	0	1	-1
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	2	-2
Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pranata Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Penyelia	9	1	2	-1
Arsiparis Penyelia	8	0	2	-2
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Mahir	8	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	0	2	-2
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7	0	1	-1
Penata Laksana Barang/Pengawas Keuangan Negara Terampil	7	0	1	-1
Pranata Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Terampil	7	1	1	0
Arsiparis Terampil	6	0	2	-2
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	0	1	-1
Penata Layanan Operasional	7	2	2	0
Pengelola Layanan Operasional	6	2	2	0
Operator Layanan Operasional	5	3	3	0

Keterangan :
 + : JF penyeteraan
 ++ : JP dengan Kualifikasi Pendidikan SLTA/Sederajat
 +++ : JP dengan Kualifikasi Pendidikan SLTP/Sederajat

7. Peta Bisnis Loka Labkesmas Kupang



8. Dokumentasi Kegiatan

a. Money WBK



Gambar 1. Dokumentasi Zoom Money WBK

b. Money IKK



Gambar 2. Dokumentasi Zoom Money IKK

c. Apel Senin Pagi



Gambar 3. Dokumentasi Upacara Senin Pagi



d. Pertemuan/ Rapat



Gambar 4. Pertemuan/ Rapat

e. Penerimaan CPNS dan Pengenalan Lingkungan Kantor



Gambar 5. Penerimaan CPNS 2025

f. Pelaksanaan kegiatan surveilans malaria



Gambar 6. Survei Habitat Nyamuk *Anopheles spp.*



g. Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Hanta Virus bersama Tim BB Labkesling Salatiga



Gambar 7. Proses Identifikasi tikus

h. Pelaksanaan kegiatan surveilans kecacingan



Gambar 8. Proses pengambilan darah jari



i. Pelaksanaan kegiatan surveilans DBD



Gambar 9. Pengambilan jentik nyamuk *Aedes spp.*

j. Pelaksanaan kegiatan surveilans HIV



Gambar 10. Proses Pengambilan Darah Jari pada ABK Kapal



k. Pelaksanaan kegiatan surveilans leptospirosis



Gambar 11: Persiapan Pemasangan Perangkap Tikus

l. Kegiatan BIMTEK Surveilans Vektor Berbasis Laboratorium



Gambar 12. Zoom BIMTEK Surveilans Vektor Berbasis Laboratorium

m. Keikutsertaan dalam Kegiatan Kearsipan



Gambar 13. Kegiatan Kearsipan



n. Pendampingan Konfirmasi Aset yang akan dihibahkan ke Pemda Sumba Barat



Gambar 14. Pendampingan Hibah

o. Monev Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK oleh Irjen



Gambar 15. Monev TL LHP BPK

p. Kegiatan Perencana dan Anggaran



Gambar 16. Desk dan Pra Reviu Pagu Alokasi Tahun 2026

q. Review Tim SKI



Gambar 17. Kegiatan Review BMN